

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Ruang Lingkup dan Gambar Desain Penelitian.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	14
2.1 Tinjauan Pustaka.....	14
2.2 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	37

3.1	Desain Penelitian.....	37
3.2	Sumber Data/Subyek/Obyek Penelitian.....	38
3.2.1	Sumber Data.....	38
3.2.2	Subyek Penelitian.....	39
3.2.3	Obyek Penelitian.....	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4	Teknik Analisis Data.....	42
3.5	Prosedur Penelitian.....	46
3.5.1	Instrumen Penelitian	46
3.5.2	Data Primer	47
3.5.3	Data Sekunder.....	47
3.5.4	Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data.....	48
3.6	Dampak.....	48
3.7	Pelaksanaan Jadwal Penelitian	49
B A B 4	ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA.....	50
4.1	Gambaran Subjek dan Objek Penelitian.....	50
4.2	Analisis Data dan Interpretasi Hasil.....'	64
4.3	Pembahasan.....	71
B A B 5	SIMPULAN DAN SARAN.....	92
5.1	Simpulan.....	92
5.2	Saran.....	94
	DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 3.2	Langkah-langkah Analisa Data	44
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Korps Marinir.....	55
Gambar 4.4	Struktur Organisasi Pasmars 2 Korps Marinir.....	61
Gambar 4.5	Struktur Jabatan Brigif 2 Marinir.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Operasi Militer Selain Perang.....	7
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.3	Daftar Informan.	41
Tabel 3 4	Jadwal Waktu Penelitian.....	49
Tabel 4.5	Prosentase Nilai Uji Nilai Perorangan Dasar.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Latihan Brigif 2 Marinir

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Panduan Wawancara

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Lampiran 5 Observasi Kegiatan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Operasi Militer Untuk Perang (OMP) merupakan segala bentuk penggunaan dan pengerahan kekuatan militer untuk melawan kekuatan militer Negara lain yang melakukan agresi terhadap negara kesatuan republik indonesia (NKRI) dan atau terjadi konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional, seperti pada tahun 1960an terjadi pengerahan kekuatan militer dalam kegiatan operasi militer untuk perang yaitu konfrontasi indonesia-malaysia atau dikenal dengan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), OMP juga terjadi saat peristiwa Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dilakukan rakyat indonesia dengan tujuan mengusir imperialisme dari Irian Barat (sekarang Papua). Hal ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat dari pemerintahan republik Indonesia atas tindakan kolonial belanda yang mendeklarasikan kemerdekaan negara boneka irian barat. Trikora berisi tiga hal, yaitu a) Gagalkan pembentukan negara boneka papua buatan kolonial belanda; b) Kibarkan sang merah putih di irian barat tanah air indonesia; c) Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Saat itu Militer langsung mengambil langkah antisipasi pelaksanaan amanat Trikora dengan membentuk komando operasi pada tanggal 2 Januari 1962, yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan tugasnya yaitu merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer untuk mengembalikan irian barat ke dalam wilayah republik indonesia.

Sejak dilaksanakannya operasi Dwikora dalam konfrontasi melawan malaysia dan operasi Trikora bertempur melawan belanda untuk memperebutkan irian barat, sampai sekarang ini belum ada operasi militer yang dapat dikategorikan dalam OMP, karena ancaman yang dihadapi sekarang cenderung berupa ancaman nirmiliter yang tidak secara

langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun demikian tetap perlu diwaspadai karena pada skala tertentu dapat berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas nasional, yang akhirnya mengancam eksistensi negara. Ancaman nirmiliter harus ditangani dengan cara nirmiliter, sedangkan fungsi militer seperti yang dilaksanakan prajurit Korps Marinir dapat dilibatkan melalui penugasan OMSP seperti bantuan pengamanan tamu negara, bantuan kepada pemerintah daerah, bantuan SAR dan bantuan pemberdayaan wilayah. Menghadapi situasi seperti ini bukan berarti militer menjadi terlena dan tidak melaksanakan kegiatan sesuai asasinya yaitu mengasah ketrampilan militernya, supaya prajurit mempunyai naluri tempur dan kesiapsiagaan melindungi bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan militer dari negara lain terhadap NKRI.

Tugas pokok militer sesuai UU No. 34/ 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugasnya dinyatakan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara di ayat (2) dinyatakan bahwa dalam tugas pokok sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Di dalam OMSP dirinci menjadi 14 butir tugas yaitu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan

perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Dalam menjalankan perannya, militer berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman; sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sementara, untuk menghadapi bentuk dan sifat ancaman nirmiliter, menempatkan kementerian dan lembaga sebagai *leading sector* dan militer sebagai pendukung. Kemhan RI Buku Putih (2015, h. 107). Pada pasal 9, Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah dan melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Luasnya wilayah negara kesatuan republik indonesia, secara geografis memiliki nilai strategis bagi bangsa indonesia, karena terletak pada posisi silang diantara dua benua yaitu Asia dan Australia serta diantara dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia, tetapi disisi lain konfigurasi geografis Indonesia ini juga menjadi sangat rawan terhadap berbagai macam ancaman, antisipasi Angkatan Laut dalam mencegah dan menanggulangnya, dituntut kemampuan pengendalian laut yang

dilaksanakan melalui gelar patroli kapal-kapal perangnya dan proyeksi kekuatan melalui operasi amfibi.

Korps Marinir merupakan salah satu komando utama pembinaan dan operasional TNI AL, mempunyai tugas membentuk brigade pendarat amfibi sebagai kekuatan pemukul strategis yang dapat diproyeksikan setiap saat ke seluruh penjuru wilayah nusantara. Untuk mengantisipasi tugas-tugas dari satuan atas, Komandan Korps Marinir (Dankormar) menyiapkan prajurit dan materialnya sesuai fungsi dan kesenjataannya, dipadukan menjadi satu kekuatan yang memiliki kemampuan sebagai pasukan pendarat. Prajurit yang tergabung dalam pasukan pendarat, secara rutin dilatih, baik bertempur perorangan maupun satuan, sehingga mempunyai kemampuan tempur menembak, kemampuan gerak dan kemampuan administrasi serta logistik dengan baik. Brigade Pendarat (Brigrat) Korps Marinir saat ini dibentuk dalam 3 (tiga) wilayah yaitu wilayah timur dibawah Pasmal-1 dibentuk Brigrat 1 Marinir, wilayah barat dibawah Pasmal-2 dibentuk Brigrat-2 Marinir dan Brigrat-3 sebagai Brigrat cadangan berada di wilayah Lampung.

Operasi amfibi merupakan salah satu dari kegiatan OMP yang dilaksanakan oleh gabungan antar matra atau hanya TNI AL, yang dapat diartikan sebagai suatu serangan yang dilancarkan dari laut oleh satuan laut TNI AL dan pasukan pendarat yang dimuat dalam kapal-kapal dan sarana pendarat amfibi serta didaratkan di pantai musuh dan/atau pantai yang berpotensi dikuasai musuh. Keppang TNI, tentang Doktrin Operasi Amfibi, (2013, h 3), dikatakan bahwa, operasi amfibi diselenggarakan dalam rangka operasi pertahanan baik bersifat ofensif strategis maupun defensif strategis, serta berperan sebagai salah satu pemukul yang menentukan dalam rangka operasi keamanan dalam negeri. Operasi amfibi dalam pelaksanaannya mengintegrasikan berbagai jenis kekuatan yaitu kapal, pesawat udara, dan pasukan pendarat, dalam suatu serangan terhadap pantai musuh dan atau pantai yang berpotensi dikuasai musuh, serta bersifat kelautan dalam arti bahwa TNI AL memegang peranan utama sebagaimana tercermin dalam cara pelaksanaan operasi tersebut.

Beberapa elemen yang berperan dan terlibat dalam pelaksanaan operasi amfibi, salah satunya adalah prajurit pasukan pendarat. Pasal 21 dijelaskan bahwa prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, sementara pada pasal 26a. bahwa prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan Perwira (dari letnan dua sampai dengan jenderal), Bintara (dari sersan dua sampai dengan pembantu letnan satu), dan Tamtama (dari prada sampai kopral kepala). Kekuatan prajurit yang tergabung dalam pasukan pendarat selalu disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk kepangkatannya karena pasukan pendarat merupakan organisasi tugas yang dibentuk dan disusun berdasarkan tugas operasi yang akan dilaksanakan yaitu meliputi keadaan daerah operasi, keadaan musuh dan pasukan sendiri serta sarana angkut yang tersedia. Organisasi Brigade Pendarat Korps Marinir merupakan salah satu unsur sub komando tugas amfibi yang dibentuk khusus sebagai pasukan pendarat dari unsur Brigade infanteri sebagai inti dengan unsur lainnya yaitu Kavaleri, Artileri serta Bantuan tempur yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Komando Tugas Gabungan Amphibi untuk diproyeksikan pada suatu tempat pendaratan.

Brigade infanteri korps marinir sebagai pasukan pendarat, tugasnya adalah membina kemampuan dan menyiapkan kekuatan tempur marinir dalam melaksanakan operasi pendaratan amfibi, pertahanan pangkalan TNI AL dan tugas-tugas operasi tempur lainnya. Seskoal, Orientasi Pasmar dan Brigade Pendarat Marinir (2010, h 8) Brigade infanteri 2 marinir merupakan satuan pelaksana (Satlak) dibawah Pasmar-2 marinir, dalam melaksanakan tugas-tugas tempur dengan mencari, mendekati dan menghancurkan musuh dengan tembakan dan gerakan atau menangkis serangan musuh dengan tembakan dan pertempuran jarak dekat, serta melakukan serangan balas. Untuk menunjang tugas tersebut, setiap prajurit mempunyai kewajiban memantapkan kemampuan dan mempertahankan kondisi fisik, supaya tetap prima, disiplin, membina

mental juang dan tempur yang tinggi, guna meningkatkan profesionalisme, melalui latihan-latihan sebagai pasukan pendarat dalam rangka pelaksanaan operasi amfibi, yang merupakan salah satu bentuk dari operasi militer untuk perang (OMP)

Mengantisipasi keadaan tersebut diatas, perilaku sosok prajurit ideal marinir yang diharapkan adalah prajurit yang mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sapta marga dan sumpah prajurit, serta sadar akan hakekatnya sebagai pasukan pendarat yang harus disiplin berlatih baik perorangan maupun dalam hubungan Satuan, supaya menjadi prajurit profesional dibidangnya. Tuntutan masyarakat terhadap militer supaya menjadi prajurit profesional adalah suatu keniscayaan, karena mereka secara tidak langsung telah membiayai untuk membangun postur kekuatan militer yaitu melalui anggaran yang dipungut melalui pajak rakyat. Profesionalisme prajurit merupakan karakter prajurit profesional yang memiliki keahlian dan ketrampilan khusus dalam bidangnya, seperti prajurit yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan peralatan tempur sesuai fungsinya, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas, seperti menurut Samuel P. Huntington *The Soldier and the State*. (1957, h 84) Menjadi militer profesional artinya adalah “menjadi prajurit yang berkeahlian, memiliki rasa tanggung jawab, dan bersih dari unsur-unsur politik.”

Kemampuan bertempur yang dimiliki seorang prajurit, merupakan cara yang paling efektif dalam menghadapi ancaman dan gangguan yang menggunakan kekuatan bersenjata, baik yang dilakukan oleh *state actor* maupun *nonstate actor* yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Mutlak bagi prajurit Brigif 2 Marinir untuk mempersiapkan kesiapan tempurnya dalam mengemban tugas OMP, meskipun saat ini persiapannya banyak disibukkan dan dipengaruhi oleh penugasan operasi militer selain perang (OMSP), keduanya harus dapat dilaksanakan secara optimal, karena baik OMP

maupun OMSP merupakan tugas pokok yang telah diamanatkan oleh undang-undang, seperti pada tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1. Data Operasi OMSP Prajurit
Brigade Infanteri 2 Marinir**

NO	JENIS KEGIATAN	JUML PERS 2015	JUML PERS 2016	JUML PERS 2017
1	Satgas Kongo, Lebanon, Sudan	32 Pers	3 Pers	14 Pers
2	Ekspedisi khatulistiwa	19 Pers	5 Pers	-
3	Satgas PT KAI, PT Angkasa Pura, SRCPB Hutan	967 Pers	429 Pers	80 Pers
4	Pam KTT, Buruh, Lebaran	858 Pers	763 Pers	270 Pers-
5	Pam Mabes TNI, Vip,	340 Pers	320 Pers	160 Pers
6	Pam Instalasi Pulau Damar	-	-	8 Pers
7	Satgas Pilkada	-	-	899 Pers
	Jumlah	2216 Pers	1520 Pers	1161 Pers

Sumber data dari Staf Operasi Brigade Infanteri 2 Marinir Tahun 2015-2017

Melaksanakan tugas perbantuan juga merupakan tugas pokok prajurit, tetapi harus diingat bahwa pelaksanaan penugasan OMSP tidak boleh mengurangi aktifitas kegiatan dalam rangka memantapkan dan mempersiapkan kemampuan pelaksanaan OMP. Menurut Albrecht Schnabel and Marc Krupanski (2008) dalam Jurnal Problematika Tugas Perbantuan TNI, Diandra Megaputri Mengko menyatakan bahwa pada prinsipnya peran internal militer perlu ditempatkan sebagai respon terhadap beberapa situasi yang terbatas, maksud dari situasi terbatas adalah ketika terdapat keterbatasan instansi sipil dalam menghadapi situasi tersebut, hal ini dikarenakan situasinya sangat jarang muncul dan membutuhkan biaya yang begitu besar untuk mempersiapkan kapabilitas instansi sipil dalam menghadapinya, sementara kapabilitas ini telah dimiliki oleh kekuatan militer. Oleh karena itu, peran internal militer ditujukan sebagai bantuan terhadap instansi sipil dan merupakan *last resort*, dibawah otoritas sipil yang bertanggung jawab dan hanya dibatasi dalam

hal penguatan kapabilitas dan kapasitas yang dibutuhkan dengan melibatkan militer dalam penugasan OMSP, hal ini merupakan segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan militer untuk kegiatan selain perang.

Penugasan OMSP seperti penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang sulit untuk diprediksi, karena kejadiannya dapat terjadi sewaktu-waktu dan eskalasinya begitu cepat, sehingga perlu koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu, dan akuntabel, sangat diperlukan dalam penanggulangannya, agar dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi. Ada beberapa penugasan OMSP yang sudah dilembagakan, personilnya juga banyak dari anggota militer aktif, mulai dari pangkat terendah hingga Jenderal bintang tiga, ada yang masih di bawah kendali operasi, tetapi banyak juga yang sudah menjadi anggota tetap atau organik satuan tersebut, seperti di Basarnas, Badan nasional penanggulangan bencana (BNPB), Badan narkotika nasional (BNN), Pasukan pengamanan presiden (Paspampres) dan Badan keamanan laut (Bakamla).

Menurut UU 34/2004 pasal 2 Jati Diri Tentara Nasional Indonesia adalah a). Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; b). Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; c). Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan d). Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Implementasi dari jati diri tersebut diatas berarti, militer perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militernya, dilatih bermanuver, diberikan pembelajaran supaya menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta diperhatikan kesejahteraannya oleh negara, sehingga diharapkan mahir bertempur. Prajurit bisa dikatakan profesional apabila senantiasa membekali diri dengan cara berlatih dan mengasah keterampilannya, menggunakan alat peralatan perorangan maupun satuannya dengan baik dan benar.

Selama ini peneliti melihat fenomena di lapangan bahwa penugasan OMSP mempengaruhi tingkat profesionalisme prajurit yang melaksanakannya, dalam mempersiapkan diri mengemban tugas OMP, meskipun jumlahnya sedikit, tetapi kalau terus menerus dibiarkan dan tidak ditangani secara proporsional akan berdampak terhadap kemampuan naluri tempur prajurit, serta akan menimbulkan ketidaksiapan melaksanakan operasi militer untuk perang. Harapan peneliti bahwa seorang prajurit setiap saat harus mengasah ketrampilan bertempurnya dan tidak terpengaruh oleh kegiatan diluar asasinya, supaya mempunyai kesiapan dalam menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan menjamin keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan baik yang datang dari luar dan atau dari dalam negeri. Dengan demikian peneliti menulis judul **“Evaluasi Dampak Penugasan Operasi Militer Selain Perang terhadap kesiapan Operasi Militer Untuk Perang Prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, didapatkan bahwasannya penugasan OMSP yang dibebankan kepada satuan tempur, dalam hal ini Brigade infanteri 2 marinir, dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga secara baik, terutama lamanya waktu penugasan dan rotasi penggantian personil, supaya tidak mempengaruhi profesionalisme prajurit yang terlibat. Sejatinya seorang prajurit wajib setiap saat mengasah ketrampilan militernya, baik perorangan maupun dalam hubungan satuan, agar mahir menggunakan alat utama sistem senjata yang diawaki, supaya mampu menghadapi tugas dan siap melaksanakan operasi militer untuk perang. Rumusan masalah yang

dapat dikemukakan disini adalah bagaimana evaluasi dampak penugasan operasi militer selain perang terhadap kesiapan operasi militer untuk perang prajurit Brigade infanteri 2 marinir.

Selanjutnya berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas dapat diwujudkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimanakah dampak penugasan operasi militer selain perang bagi Prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir ?

1.2.2 Bagaimanakah kesiapan operasi militer untuk perang bagi Prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir ?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan pada intinya mengevaluasi dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan operasi militer untuk perang prajurit brigade infanteri 2 marinir, sebagai salah satu unsur pasukan pendarat korps marinir, bertujuan untuk :

1.3.1.1 Mengevaluasi dampak penugasan OMSP prajurit brigade infanteri-2 marinir.

1.3.1.2 Mengevaluasi kesiapan OMP prajurit brigade infanteri 2 marinir ?

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini tentu tidak hanya memberikan masukan bagi stakeholders yang terdiri dari Dan Kormar, Kadis Operasi dan Latihan TNI AL, Dan Pasmal, Asops dan Aspers Dankormar, Dankolatmar, Komandan dan Pasops Brigade Infanteri 2 Marinir, tetapi juga menginspirasi satuan tempur TNI supaya lebih disiplin dan profesional, serta mempunyai kesiapsiagaan menghadapi segala ancaman dan gangguan, yang sewaktu-waktu mengancam kedaulatan NKRI. Untuk mewujudkan kesiapan prajurit yang diharapkan tersebut, berlatih dan berlatih menjadi satu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Seorang prajurit yang profesional akan bangga, apabila mendapatkan penugasan operasi tempur, dibandingkan dengan

mendapatkan penugasan OMSP, sehingga peneliti melakukan penelitian ini, yang diharapkan juga bisa menambahkan wawasan pengetahuan, terutama untuk mengevaluasi dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan OMP prajurit brigade infanteri 2 marinir

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat terutama untuk menjelaskan pentingnya mengetahui, bagaimana evaluasi dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan OMP prajurit, khususnya yang ada di brigade infanteri 2 marinir. Seorang prajurit harus disiplin dan profesional dibidangnya, karena hal ini menentukan bagaimana kesiapan satuan dalam menghadapi penugasan baik saat ini maupun masa yang akan datang.

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan studi dan kajian tentang evaluasi dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan OMP prajurit brigade infanteri-2 marinir.

1.4.1.2 Penelitian ini juga diharapkan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru tentang pemahaman dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan OMP prajurit.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi stakeholders, merumuskan kebijakan dalam rangka mengetahui dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan OMP prajurit brigade infanteri - 2 marinir. Penelitian ini juga untuk meyakinkan kembali kepada pimpinan TNI umumnya dan Korps Marinir khususnya apakah ke depan penugasan OMSP masih perlu melibatkan satuan tempur yang secara khusus disiapkan untuk mengatasi agresi dari luar atau OMP yang sewaktu-waktu muncul dan mengganggu stabilitas nasional.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam rangka menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara yang bersifat militer, mengatasinya membutuhkan keterpaduan semua komponen yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, supaya kemampuan yang ada dapat diberdayakan untuk menghancurkan musuh dan atau mengusir ke luar dari negara kesatuan republik indonesia. TNI sebagai komponen utama tidak akan bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, tanpa adanya dukungan masyarakat yang bersifat kesemestaan, termasuk operasi yang dilakukan oleh prajurit marinir. Dalam penelitian ini peneliti membatasi pada pelaksanaan tugas OMP melalui kesiapan operasi amfibi, yang salah satu unsurnya adalah brigade infanteri-2 marinir, sebagai kekuatan inti Brigade Pendarat.

1.5.2 Design Penelitian

Dari permasalahan yang diangkat, bagaimanakah evaluasi dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan operasi militer untuk perang prajurit brigade infanteri 2 marinir, yang akan dikaji dengan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Jakarta.

Berpijak dari uraian dan analisis interpretatif, akan terlihat bagaimanakah evaluasi dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan operasi militer untuk perang prajurit brigade infanteri-2 marinir. Selanjutnya akan dirumuskan metoda yang efektif untuk meningkatkan kesiapan prajurit dalam melaksanakan operasi. Berikut ini sistematika penulisan hasil penelitian yang direncanakan, sesuai pedoman penulisan karya akhir studi (Tesis) di Universitas Pertahanan.

Bab I Pendahuluan; terdiri dari lima sub-bab yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka dan kerangka pemikiran; terdiri dari sub-bab tinjauan pustaka yang berisi definisi dampak, teori perang, teori kesiapan

operasi, teori operasi dan bahasan hasil penelitian sebelumnya, serta sub-bab kerangka pemikiran

Bab III Metode Penelitian; berisi tujuh sub-bab yaitu desain penelitian, sumber data/subjek/objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian (instrumen, data primer, data sekunder, pengujian keabsahan dan keterandalan data) dan jadwal penelitian.

Bab IV Analisa dan Pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan gambaran subjek dan objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil serta membahasnya atau menilai secara intensif antara keinginan ideal dihadapkan dengan realita di lapangan sehingga dapat dirumuskan dengan baik terkait dampak penugasan OMSP bagi prajurit.

Bab V Simpulan dan saran. Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran rekomendasi yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian serta hasil yang didapatkan dari penelitian.

Daftar Pustaka

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Evaluasi

Menurut *Stake* dalam Suharsimi dan Cepi AJ (2014), mengatakan bahwa model *Stake* menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok yaitu : Deskripsi (*description*), Pertimbangan (*Judgement*) dan membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program yaitu anteseden (*antecedents/context*), transaksi (*transaction/process*) dan keluaran (*Output-outcomes*). Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal yaitu :

- 1) Anteseden yang diartikan sebagai konteks
- 2) Transaksi yang diartikan sebagai proses
- 3) Outcomes yang diartikan sebagai hasil

Pada setiap unsur terdapat tiga fase penting yang didasarkan pada pemikiran *Stake*, bahwa suatu evaluasi formal harus memberikan perhatian pada keadaan sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, ketika proses implementasi, dan menghubungkannya dengan capaian hasil. Pemikiran tersebut diterjemahkan dalam istilah *antecedents*, *transactions*, dan *outcomes*. *Antecedent* adalah keadaan sebelum, *transactions* adalah proses, dan *outcomes* adalah kemampuan hasil yang dicapai setelah melalui proses. Sementara menurut Michael Scriven tentang model Evaluasi *Formatif Summatif Evaluaion* dalam Suharsimi dan Cepi AJ (2014), mengatakan bahwa model formatif dan sumatif ini dilakukan pada waktu program masih berjalan disebut evaluasi formatif dan ketika program sudah selesai atau berakhir yang disebut evaluasi sumatif. Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya

hambatan dan hal hal yang menyebabkan program tidak lancar, sehingga pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Berbeda lagi menurut Tyler dalam Suharsimi dan Cepi AJ (2014 yaitu model *Goal Oriented Evaluation* mengatakan bahwa tujuan merupakan program yang telah ditetapkan jauh sebelum dimulai. Evaluasi ini dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus dan mengecek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model ini berorientasi pada tujuan, dan cocok diterapkan untuk mengevaluasi program yang jenisnya pemrosesan, program layanan dan dalam bentuk pelajaran. Peninjauan atas keterlaksanaan tujuan, dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan yang terjadi, baik hal-hal yang positif atau yang diharapkan maupun hal-hal yang negatif atau yang tidak diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disintesis bahwa evaluasi merupakan suatu proses tersedianya informasi, tentang sejauh mana suatu kegiatan atau program tertentu telah dicapai. Seperti yang disampaikan Michael Scriven bahwa evaluasi dilakukan pada waktu program masih berproses atau berjalan secara formatif dan saat program sudah dinyatakan selesai atau berakhir secara sumatif. Sementara Tyler melakukan evaluasi secara berkesinambungan dan terus menerus, guna memonitor seberapa jauh apa yang sudah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga yang dikatakan Stake bahwa evaluasi harus memberikan perhatian khusus pada keadaan sebelum, saat proses dan pencapaian hasil dari kebijakan yang diimplementasikan.

2.1.2. Dampak

Dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal yang sangat penting, dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang

dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen. Sementara menurut Otto Soemarwoto, Dampak adalah pengaruh suatu kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010) Bisa diartikan secara sederhana bahwa Dampak merupakan pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin atau komandan, sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari uraian diatas maka dampak dapat dibagi ke dalam dua pengertian yaitu ;

a. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya, sedangkan Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha secara sadar, bila sesuatu terjadi pada dirinya, supaya fokus mental tidak terpengaruh pada hal-hal negatif. Bagi orang yang berpikiran positif, bila mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir tentang hal buruk atau negatif, maka ia akan segera memulihkan dirinya. Positif adalah pasti dan nyata dari suatu pikiran, terutama dalam memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah suatu keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain,

dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Dampak Negatif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya, sementara arti negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya, sehingga dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk atau negatif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disintesis, bahwa dampak merupakan akibat dari menjalankan setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan pengaruh, bisa bersifat positif maupun negatif tergantung pada situasi dan kondisi lingkungan saat dilakukannya suatu kegiatan. Hasil setiap program yang dijalankan tidak selalu berjalan baik seperti yang diharapkan, meskipun sudah direncanakan sebelumnya. Kesiapan seseorang mengantisipasi keadaan apapun yang akan terjadi, terutama bila hasilnya mengecewakan, justru menentukan keberhasilan dikemudian hari. Sikap mental pantang menyerah menjadikan seseorang bisa bangkit dari keterpurukkan dan tidak mudah patah arang saat mengalami situasi yang sulit.

2.1.3 Kompetensi

Istilah Kompetensi menurut Webster's Dictionary mulai muncul pada tahun 1596. Istilah ini diambil dari kata latin "*competere*" yang artinya "*to be suitable*". Kemudian ini secara substansial mengalami perubahan dengan masuknya berbagai isu dan pembahasan mengenai konsep kompetensi dari berbagai literatur. Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian (2003, h 5) yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri

sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Menurut Spencer & Spencer dalam Moeheriono (2010, h 3-4) menjelaskan bahwa kompetensi adalah Karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang dimiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang dan dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan atau *job tasks*. (Spencer & Spencer dalam Moeheriono, 2010, h 4). Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

- a. Karakteristik dasar (*underlying characteristic*)
Kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada diri seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan
- b. Hubungan Kausal (*causally related*)
Kompetensi berarti dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksi kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan memiliki kinerja tinggi pula. (sebagai akibat)
- c. Kriteria (*criterion referenced*)
Kompetensi merupakan acuan secara nyata dan memprediksikan seseorang dapat bekerja secara baik, harus terukur dan spesifik.

Menurut Mc.Clelland dalam Moeheriono, (2010, h 6) menjelaskan bahwa kompetensi adalah Karakteristik personel yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada suatu situasi tertentu. Pendekatan ini didefinisikan sebagai kompetensi perilaku (*behavioral competence*), yang dikenal dengan pendekatan *US Approach*, sementara *French Approach*,

kompetensi merupakan kumpulan dari beberapa elemen psikologi seseorang dengan menggunakan "*self image*" sebagai landasannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disintesis bahwa kompetensi merupakan kemampuan dalam bekerja dengan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta nilai-nilai pribadi seseorang, berdasarkan pengalaman, pembelajaran secara profesional, efektif dan efisien. Karakteristik dasar personel secara nyata dapat memprediksikan seseorang bisa bekerja secara baik, terukur dan spesifik. Personel menjadi faktor penentu terhadap sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan pada situasi khusus. Kompetensi bisa juga kecakapan dan kewenangan atau kecerdikan seseorang, dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian, penekanannya kepada kemampuan seseorang dan kewenangannya dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan atau pekerjaannya di dalam organisasi, baik instansi swasta maupun pemerintah.

2.1.4 Perang

Perang menurut Sun Tzu berarti kegiatan tipu muslihat. Panglima militer selaku pengawal negara dapat memenangkan peperangan, bila tekun menyusun dan menyiapkan siasat perang dengan cermat. Eksistensi suatu negara ditentukan oleh seberapa kuat pengawalnya, karena kemampuan yang dimiliki menjadikan mampu melindungi negaranya dari setiap ancaman. Konsep perang Sun Tzu yang paling populer adalah "Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri sekaligus mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, maka seratus kali berperang, seratus kali pula akan menang." Menurutnya perang menyangkut harkat dan martabat seorang prajurit, serta keberadaan suatu bangsa. Empat faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang ksatria, supaya mempunyai semangat dan tekad melindungi negara dari serangan negara lain yang mengganggu kedaulatan, wilayah dan keselamatan bangsanya, yaitu

- a. Kecepatan bertindak artinya dalam situasi genting masih mampu berfikir cerdas, cermat dan cekatan. Orang yang berhasil merupakan orang yang cepat bertindak dan jeli memanfaatkan peluang yang ada.
- b. Berani artinya mempunyai kemampuan memprediksi resiko yang bakal dihadapi dan tidak takut gagal. Orang yang mempunyai semangat keberanian dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, baginya kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda, sehingga mampu bangkit kembali dari keterpurukannya.
- c.. Kekuatan komitmen artinya mempunyai keinginan kuat untuk maju dan berkembang serta membela negaranya.
- d. Ketegasan. artinya setiap orang harus tegas terhadap diri sendiri dan orang yang dipimpinnya, supaya fokus terhadap apa yang akan dicapai. Badan eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Makasar (2013)

Sementara Perang Menurut Macchiavelli merupakan jalan utama mencapai kepentingan nasional dan sesuatu yang alamiah dalam menyelesaikan masalah yang penting. Jika negara gagal menyelesaikan konflik melalui diplomasi, perang merupakan jalan terbaik untuk ditempuh dan keterlibatan suatu negara dalam perang berlarut, mewajibkan warga negaranya mendukung secara penuh melalui *Conscript* atau wajib militer. Tanggung jawab membela negara, sepenuhnya berada pada seluruh warga negara. Oleh karena itu, wajib militer merupakan bentuk tanggung jawab nasionalisme warganya. Hal ini juga berpengaruh pada penambahan jumlah militer yang akan berperang melawan agresor. Beberapa prinsip Macchiavelli yang penting adalah :

- a. Perang merupakan jalan terakhir, apabila aktivitas kehidupan politik mengalami jalan buntu.
- b. Tujuan perang harus menjadikan musuh mengalami kekalahan total.

- c. Perang harus *short and sharp*, tidak boleh berlarut karena bila terjadi berarti menguras banyak biaya dan sumber daya yang dimiliki negara.
- d. Kemenangan dapat dicapai, bila menggunakan semua kekuatan sumber daya yang dimiliki secara penuh dan prioritas. Walter Pinem (2017)

Kalau menurut Clausewitz perang berarti penggunaan kekerasan secara legal dengan tujuan mengalahkan musuh, sampai musuh tidak mampu bangkit melakukan serangan balas, sehingga untuk memenangkannya harus dapat menghitung kekuatan dan kemampuan militernya. Menurutnya pula perang juga berarti kelanjutan dari keputusan politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dan juga sebuah duel yang berisi kompetisi antar dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda, tetapi tetap ada unsur politik di dalamnya, karena pada akhirnya perang merupakan satu kegiatan untuk pemenuhan tujuan politik negara. Sementara strateginya menurut Clausewitz, bahwa prajurit yang berada dalam peperangan harus memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalan, supaya dapat memberikan solusi atas suatu masalah dalam medan peperangan. Baginya moral merupakan kekuatan militer yang sangat menentukan, karena moral dalam perang berarti keberanian dan tekad sesuai perannya masing-masing untuk menghancurkan musuh. Clausewitz menekankan juga adanya beberapa aksi resiprokal yang dianggapnya selalu ada dalam perang.

Yang pertama, bahwa perang adalah tindakan kekerasan dimana pihak yang satu memaksakan kehendaknya kepada pihak lain yang telah dikalahkan;

Yang kedua adalah bahwa tujuan perang adalah menghancurkan kekuatan lawan dan perlengkapannya, supaya musuh tidak mempunyai kesempatan lagi, untuk bangkit melakukan perlawanan kembali. yang pada akhirnya akan memaksakan kehendaknya;

Yang ketiga, untuk mengalahkan musuh, pengerahan kekuatan secara maksimal perlu dilakukan, melebihi kekuatan dan kemampuan musuh. Hal ini perlu dilakukan, karena musuh juga mempunyai pemikiran yang sama dalam meningkatkan kemampuan militernya.

Clausewitz memperkenalkan istilah *The Trinity of war* adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan yang saling melengkapi antara tiga variable dalam perang yaitu pemerintah, rakyat dan militer. Mengandung arti bahwa untuk menghancurkan suatu negara harus bisa meruntuhkan variable tersebut secara bersamaan. Erghy Ghulam Habibie (2012). Hal ini juga diaminikan oleh Makmur S (2016, h 163) bahwa perang merupakan suatu hasil dari sebuah konflik dari berbagai macam kepentingan kepentingan besar yang disertai pertumpahan darah, sehingga bentuk konflik yang merujuk ke suatu peperangan sangatlah berbeda dengan konflik konflik yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disintesisikan bahwa perang merupakan alternatif terakhir, apabila terjadi kebuntuan diplomasi dengan negara lain. Kemenangan sebuah perang, ditentukan oleh kecerdikan pemimpin militer yang bisa membaca situasi musuh, medan dan cuaca di medan perang serta mampu membina prajuritnya, sehingga mempunyai karakter yang penuh semangat, pemberani, disiplin dan profesional. Perang bukanlah kejadian yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan kejadian yang lain, karena perang merupakan kelanjutan dari kebijakan suatu negara. Memenangkan perang mutlak harus melakukan serangan strategis dengan menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan militer yang dimiliki suatu negara. Perpaduan kekuatan militer dengan rakyat secara bersama-sama melakukan penyerangan kepada musuh, sulit untuk dikalahkan.

2.1.5 Konsep Profesional

Meraih kemenangan bagi prajurit dalam sebuah pertempuran bukanlah perkara mudah, semua unsur harus mengetahui tugas dan tanggung jawab dengan baik, dengan kata lain semuanya harus

profesional dibidangnya masing-masing, karena hal ini dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokoknya. Banyak ahli yang mendefinisikan tentang prajurit yang profesional diantaranya Peter Britton, (1996, h 67) bahwa konsep profesional prajurit adalah tentara yang terlatih, ahli dibidang militer, berada di atas semua golongan masyarakat, sebagai garda terdepan penyelamat bangsa, yang memulihkan dan memelihara integritas nasional secara terpadu serta bersama-sama rakyat melakukan perlawanan semesta. Para Perwiranya selaku satria harus mempunyai keteguhan dalam menghadapi segala macam pencobaan dan kesukaran, jiwanya harus kuat dalam mempertahankan kehormatan tanah airnya serta mempunyai moralitas yang sangat tinggi. Satria profesional dituntut disiplin tinggi dan tidak terpengaruh apapun, manakala negara membutuhkan dharma bhaktinya. Satria harus mendahulukan kepentingan tugas dan kewajiban jabatannya daripada kepentingan pribadi atau golongannya. Selain itu seorang satria harus mempunyai penguasaan terhadap seni peperangan dan ketrampilan administrasi. Ia harus mempunyai kerelaan dan ketulusan tanpa pamrih. Hal tersebut diatas dapat diperoleh melalui latihan yang berkesinambungan baik latihan internal satuan maupun antar satuan, termasuk latihan bersama prajurit negara lain.

Sementara menurut Samuel P. Huntington (1957 hal 84) mengatakan, *The one prime essential for any system of civilian control is the minimizing of military power. Objective civilian control achieves this reduction by professionalizing the military, by rendering them politically sterile and neutral.* Dapat diartikan secara bebas bahwa Yang paling utama dalam supremasi sipil atau sistem kontrol sipil adalah meminimalkan kekuatan militer secara obyektif dengan memprofesionalkan militer, dengan membuat mereka bersih dan netral dari unsur politik. Prinsip profesional mensyaratkan membangun prajurit yang profesional dan organisasi militer yang efektif dan efisien. Hal ini juga mengandung arti bahwa seorang prajurit harus memiliki keahlian dan ketrampilan khusus dalam bidangnya dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang dilakukannya. Masih menurut Huntington dalam Tim

Imparsial (2005, h 11) Memahami profesionalisme militer tidak dapat dilepaskan dari hubungan sipil-militer, bahwa supremasi sipil merupakan syarat mutlak bagi profesionalisme militer. Pendapat Huntington sangat jelas merumuskan bahwa militer hanya dapat profesional bilamana militer tidak campur tangan di bidang politik. Ia berpendapat bahwa profesionalisme militer mengandung tiga makna sebagai berikut :

Pertama Keahlian (*expertise*) yang di dalamnya mengandung makna bahwa orang yang profesional adalah orang ahli yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus dalam bidang tertentu. Pengetahuan diperoleh melalui pendidikan di lembaga yang mempunyai otoritas di bidangnya.

Kedua, Tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang di dalamnya mengandung makna bahwa orang yang profesional adalah orang yang memiliki tanggung jawab sosial atas profesinya yang memiliki klien yakni anggota masyarakat sendiri, dimana bentuk kerja dan imbalannya tidak semata-mata atas kinerja yang dilakukan. Dalam konteks profesionalisme militer, tanggung jawab sosial terlihat dari peran, fungsi, dan kinerjanya yang melindungi negara dan masyarakat dari ancaman senjata.

Ketiga, Kesatuan (*corporateness*), yang dimensinya menunjuk pada kesadaran dan loyalitas bahwa mereka adalah anggota sebuah kelompok atau lembaga khusus dan terhormat yang mempunyai kompetensi profesional berdasarkan standar formal yang ditetapkan. Dimensi ini mengandung makna bahwa mereka memiliki prinsip, struktur, lembaga, dan kode etik sendiri.

Sementara menurut Lailah Fujianti (2012), tiga kriteria seseorang dikatakan profesional, yaitu menjalankan profesinya dengan mematuhi etika profesi yang ditetapkan, mempunyai keahlian melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan melaksanakan tugas sesuai standar baku profesi yang bersangkutan. Istilah profesi banyak dipahami, bahwa suatu hal yang dipengaruhi oleh pendidikan dan keahliannya, sehingga banyak orang bekerja sesuai bidang kemampuannya. Tetapi dengan keahlian saja belum cukup disebut profesi, harus ada penguasaan teori yang mendasari

dalam praktek. Menurut Lekatompessy, JE (2003) dalam Lailah Fujianti, (2012) Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan, bahwa profesi merupakan jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang, sedangkan profesionalisme merupakan atribut individual tanpa melihat pekerjaannya. Profesionalisme dapat dilihat dari pengertian bahasanya, bisa mempunyai beberapa arti.

Pertama, profesionalisme berarti suatu keahlian, mempunyai kualifikasi khusus, berpengalaman sesuai bidang keahliannya.

Kedua, pengertian profesionalisme merujuk pada standar pekerjaan yaitu moral dan etika profesi.

Ketiga, profesionalisme berarti moral itu sendiri.

Sedangkan Elemen Profesionalisme adalah faktor yang mempengaruhi profesionalisme, dapat diidentifikasi dari lima konsep profesionalisme menurut Hall dalam Kalbers dan Forgat yaitu :

- a. Hubungan sesama profesi (*community affiliation*).
Elemen ini menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi kelompok dan formal.
- b. Kebutuhan untuk mandiri (*autonomy demand*)
Merupakan suatu pernyataan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan secara mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- c. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief self Regulation*)
Orang yang berwenang melakukan penilaian pekerjaan profesional adalah sesama profesi, bukan "orang diluar profesinya" yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya.
- d. Dedikasi pada profesi (*dedication*).
Elemen ini merupakan cermin dedikasi profesional yang dimiliki seseorang untuk tetap teguh melaksanakan pekerjaannya, meskipun imbalan yang diterima kurang.

e. Kewajiban sosial (*social obligation*)

Elemen ini menunjukkan pentingnya profesi yang didapatkan baik oleh masyarakat maupun profesional yang ahli, karena adanya pekerjaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disintesis bahwa seorang profesionalisme merupakan seseorang yang memiliki ketrampilan khusus dan mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya, menjalankan profesinya dengan mematuhi etika profesi yang ditetapkan, serta melaksanakan tugas sesuai standar baku profesi yang bersangkutan. Hal ini akibat pengaruh pendidikan yang diperoleh, sehingga mempunyai keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain, sementara Prajurit Profesional merupakan prajurit yang mahir menggunakan peralatan tempurnya, berkemampuan menembak, memiliki kelincahan bergerak dan mampu melaksanakan tugas secara terukur serta memenuhi nilai-nilai akuntabilitas.

2.1.6. Disiplin

Menurut Avin Fadila Helmi dalam Buletin Psikologi (1996) mengatakan bahwa Disiplin merupakan suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi, melalui indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Disiplin tidak semata-mata patuh dan taat terhadap penggunaan jam kerja saja.
- b. Upaya dalam mentaati peraturan tidak didasarkan adanya perasaan takut atau terpaksa,
- c. Komitmen dan loyal pada organisasi yaitu tercermin dari bagaimana sikap dalam bekerja, seseorang yang berdisiplin tinggi akan serius, loyal, juga dalam bekerja tidak mudah mengeluh, tidak berpura-pura sakit, tetapi bekerja dengan semangat tinggi

Sementara menurut James Drever Disiplin ialah kemampuan mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai

dengan hal-hal yang telah diatur dari luar atau norma yang sudah ada. Dengan kata lain, disiplin dari segi psikologis merupakan perilaku seseorang yang muncul dan mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Pratt Fairshild dari sisi sosiologi, disiplin terdiri dari dua bagian, yaitu disiplin dari dalam diri dan juga disiplin sosial. Keduanya saling berhubungan satu sama lain, sehingga seseorang yang mempunyai sikap disiplin merupakan orang-orang yang dapat mengarahkan perilaku dan perbuatannya berdasarkan patokan atau batasan tingkah laku tertentu yang diterima dalam kelompok atau lingkup sosial masing-masing. Pengaturan tingkah laku tersebut bisa diperoleh melalui jalur pendidikan dan pembelajaran. Menurut Hasibuan “2002” Disiplin ialah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disintesis bahwa disiplin merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk mentaati segala peraturan organisasi, yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan, bukan hanya pada saat berkerja tetapi juga dalam berperilaku sehari-hari. Kepatuhan di tempat kerja tidak bisa dilihat dari apa yang nampak dari luar, seperti penggunaan seragam, ketepatan waktu berangkat dan pulang kerja, tetapi juga pada sesuatu yang tidak nyata terlihat, seperti komitmen untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang, yang dinyatakan melalui komitmen terhadap diri sendiri ataupun terhadap kelompok organisasi dimana berada.

2.1.7 Kesiapan

Kesiapan (*readiness*) merupakan kemauan untuk terlibat secara penuh dengan apa yang sedang terjadi, kemampuan untuk menyediakan diri secara spontan bagi peluang-peluang tak terencana. Kesiapan

mengacu pada asumsi bahwa kepuasan itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar (*conduction unit*), dimana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Menurut kamus psikologi, kesiapan mengandung dua pengertian yaitu:

- 1) Keadaan siap siaga untuk mereaksi atau menanggapi,
- 2) Tingkat perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kesiapan adalah suatu keadaan bersiap-siap untuk mempersiapkan sesuatu”.

Menurut Dalyono, “Kesiapan adalah kemampuan yang cukup baik fisik dan mental. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan”. Oemar Hamalik juga mengartikan “kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional”. Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yusnawati, “kesiapan merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau dikonotasikan dengan kematangan fisik, psikologis, spiritual dan skill”. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, “kesiapan adalah suatu kompetensi berarti seseorang yang mempunyai kompetensi, memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat sesuatu”.

Kesiapan meliputi kemampuan untuk menempatkan dirinya jika akan memulai serangkaian gerakan yang berkaitan dengan kesiapan mental dan jasmani. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Slameto (2015, h 113) “Kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban didalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon”. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mencakup tiga aspek, yaitu:

- a. Kondisi fisik, mental, dan emosional.

- b. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan.
- c. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari.

Ketiga aspek tersebut (yang dimiliki seseorang) akan mempengaruhinya dan memenuhi/berbuat sesuatu atau jadi kecenderungan untuk berbuat sesuatu. Dalam kondisi fisik tersebut tidak termasuk kematangan, walaupun kematangan termasuk kondisi fisik. Kondisi fisik yang dimaksud misalnya kondisi fisik yang temporer (lelah, keadaan, alat indera dan lain-lain) dan yang permanen (cacat tubuh). Kondisi mental menyangkut kecerdasan. Kondisi emosional juga mempengaruhi kesiapan untuk berbuat sesuatu, hal ini karena ada hubungannya dengan motif (insentif positif, insentif negatif, hadiah, hukuman) dan itu akan berpengaruh terhadap kesiapan. Disamping itu disebutkan pula, bahwa "pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan". Kesiapan sangat penting untuk memulai suatu pekerjaan, karena dengan memiliki kesiapan, pekerjaan apapun akan dapat teratasi dan dapat dikerjakan dengan lancar serta memperoleh hasil yang baik.

Prinsip-prinsip Kesiapan bagi seorang prajurit, agar dapat melaksanakan tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi).
- b. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman.
- c. Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan.
- d. Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disintesis bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang dimiliki seorang individu atau kelompok, dalam mempersiapkan diri baik secara mental, maupun fisik untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan. Kesiapan juga merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengikuti

kompetensi, supaya memenuhi persyaratan yang ditentukan seperti kematangan fisik, psikologis, spiritual dan skill yang dimiliki untuk melaksanakan suatu tugas, sementara kesiapan bagi prajurit berarti juga merupakan bentuk siapnya personel yang mempunyai keahlian sesuai bidang yang dibutuhkan, maupun material pendukung sesuai tugas yang akan dihadapi prajurit di daerah penugasan.

2.1.8 Operasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa Operasi adalah sebuah tindakan yang ditetapkan, yaitu tindakan memperoleh hasil dari satu kegiatan atau lebih. Dalam organisasi, operasi merupakan sebuah fungsi dalam melakukan esekusi berlangsungnya kegiatan yang menghasilkan. Secara umum operasi dikatakan juga adalah kesatuan kegiatan dari keseluruhan fungsi yang ada di suatu organisasi/satuan, untuk melaksanakan rencana strategis agar dapat terus bertahan dan beroperasi. Sedangkan kamus bahasa Indonesia bahwa operasi adalah tindakan atau gerakan militer. Operasi merupakan pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan, sedangkan operasi militer adalah tindakan militer (biasanya dalam kampanye perang).

Menurut Syaiful Anwar (2016, h 326) dikatakan bahwa sumber daya manusia militer perlu disiapkan secara profesional dan seksama, sehingga mencapai tingkat kemampuan atau kompetensi seperti yang sudah ditetapkan. Penyiapan tersebut dilakukan dengan konsep sumber daya manusia, dengan didasarkan beberapa pertimbangan yang penting, pertama organisai militer harus mempunyai misi yang sangat penting untuk mempertahankan negara dari segala ancaman, kedua organisasi militer harus mempunyai keunggulan dalam sgala hal terutama sumber daya manusianya, ketiga organisasi militer harus mempunyai dan menggunakan sistem senjata yang modern dan canggih. Sementara menurut Connie Rahakundini bakrie (2007) Kemampuan pertahanan negara bukan hanya memperbesar kekuatan, tapi sasaran utama adalah mengacu tri tunggal sasaran, yakni kesiapan operasi satuan, peningkatan

dalam profesionalisme Prajurit, serta kesejahteraan Prajurit. Kesiapan operasi adalah suatu kemampuan prajurit untuk menyelesaikan suatu tugas operasi sesuai dengan ketentuan, tanpa mengalami kesulitan dan hambatan dengan hasil maksimal, dengan target yang telah ditentukan, sehingga kesiapan operasi sama dengan kemampuan atau kompetensi. Dalam hal militer, kesiapan operasi juga diartikan sama halnya dengan kesiapan tempur. Secara teoritis, unsur-unsur kesiapan tempur satuan adalah terdiri dari personel, material dan latihan. Sedangkan ditinjau dari kemampuan/kesiapan maka kategori tingkat kesiapan tempur menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Mabes TNI AL dapat dibagi menjadi:

- a. Siap tempur penuh (ST-1), yaitu suatu kondisi satuan yang mampu melaksanakan tugas sesuai fungsi utamanya atau tugas pokok yang diembannya.
- b. Siap tempur sebagian (ST-2), yaitu suatu kondisi satuan yang mampu melaksanakan tugas semua fungsi utama/tugas pokoknya, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.
- c. Siap tempur terbatas (ST-3), yaitu suatu kondisi satuan yang tidak mampu melaksanakan dua atau lebih fungsi utamanya, namun masih dapat melaksanakan tugas tertentu secara terbatas.
- d. Tidak siap tempur (ST-4), yaitu suatu kondisi satuan yang tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi tugas pokoknya secara total.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disintesiskan bahwa kesiapan operasi dalam militer adalah suatu bentuk siapnya personel dengan disiplin dan profesionalisme prajurit yang tinggi dan siapnya material pendukung untuk melaksanakan tugas-tugas satuan, yang telah dikembangkan dalam tindakan atau gerakan militer. Penyiapan tersebut dilakukan dengan konsep penyediaan sumber daya manusia, dengan didasarkan beberapa pertimbangan yang penting, pertama organisasi militer harus mempunyai misi yang sangat penting untuk mempertahankan negara dari segala ancaman, kedua organisasi militer harus mempunyai keunggulan dalam segala hal terutama sumber daya

manusianya, ketiga organisasi militer harus mempunyai dan menggunakan sistem senjata yang modern dan canggih

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas mengenai evaluasi dampak penugasan OMSP bagi prajurit. Namun peneliti paling tidak menemukan tiga penelitian terdahulu yang meneliti mengenai tugas perbantuan, seperti bantuan penanggulangan dampak bencana banjir, Perbantuan kepada pemerintah daerah dan problematika tugas perbantuan TNI. Penelitian terdahulu meneliti mengenai tugas bantuan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin dari Sekolah Staf dan Komando TNI AL 2015, dalam Tesisnya yang berjudul “Analisis kemampuan gelar satgas pasmar-2 dalam rangka tugas bantuan penanggulangan dampak bencana banjir di Jakarta”, dengan metoda penelitian kualitatif. Abidin menyimpulkan bahwa kesiapan dan kemampuan personil, akan menentukan tingkat kesiapan dan kemampuan satuan dalam melaksanakan tugas Pasmars-2, dalam melaksanakan tugas bantuan penanggulangan banjir di Jakarta. Hal ini merupakan hasil pembentukan sejak pendidikan dasar dan kejuruan, serta didukung pembinaan dan latihan yang teratur disatuan yang akan menentukan tingkat kesiapan dan kemampuan satuan dalam melaksanakan tugas tersebut. Pembinaan dan latihan yang teratur tidak saja akan memelihara kesiapan dan kemampuan satuan, namun juga mampu untuk meningkatkan motivasi dan kinerja secara maksimal dalam pelaksanaan tugas. Ketersediaan material pendukung akan menentukan tingkat kesiapan dan kemampuan satuan dalam melaksanakan tugas. Banyaknya penugasan membutuhkan kesiapan material dalam jumlah yang memadai dan kondisi baik. Secara spesifik material yang dimiliki Pasmars-2 bukan dikhususkan untuk penanggulangan bencana alam/banjir. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kesiapan dan kesiagaan Pasmars-2.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Ganjar Herdiansah, Kuntum C.U dan Sabar Simanjuntak dari Departemen ilmu politik Universitas Padjadjaran Indonesia dalam jurnalnya yang berjudul “ Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi Di Kabupaten Lebak ” dengan metoda penelitian kualitatif mereka menyimpulkan bahwa peran dan fungsi pembinaan teritorial merupakan upaya pelaksanaan perbantuan kepada pemerintah guna menopang terlaksananya program-program pemerintah daerah. upaya perbantuan kepada pemerintah daerah tidak menempatkan militer dalam tatanan kekuasaan, tetapi mendukung optimalisasi kinerja pemerintah. Seperti yang tampak pada tugas perbantuan Kodim Lebak di bidang kebencanaan, infrastruktur, ketahanan pangan, bela negara, dan bidang tata ruang yang bermanfaat bagi proses pembangunan di Kabupaten Lebak dan mengarah pada kondisi yang mendukung ketahanan nasional

c.. Penelitian yang dilakukan oleh Diandra Megaputri Mengko,.dari Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam jurnalnya yang berjudul “Problematika Tugas Perbantuan TNI” metoda penelitian kualitatif. Diandra menyimpulkan bahwa Persoalan tugas perbantuan militer di era reformasi telah menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara perlahan tapi pasti keterlibatan militer keranah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri terus terjadi. Pelibatan militer itu bahkan kadangkala melanggar dan bertentangan dengan undang-undang TNI sendiri sebagaimana terlihat dari berbagai MOU yang dibuat. Di tengah situasi seperti itu maka menjadi penting bagi pemerintah untuk segera membuat aturan hukum setingkat undang-undang tentang tugas perbantuan militer, dimana di dalamnya mengharuskan perlunya kejelasan otoritas sipil (Presiden) yang memiliki kewenangan dalam inisiasi atau koordinasi tugas perbantuan, didasarkan kepada keputusan politik negara (legitimasi), dilaksanakan dalam situasi yang terbatas dan dalam waktu sementara. Dari ketiga peneltian tersebut diatas, maka peneliti memadukan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	Judul /Metoda	Peneliti	Kesimpulan
1	Analisis kemampuan gelar satgas pasmar-2 dalam rangka tugas bantuan penanggulangan dampak bencana banjir di jakarta (Kualitatif)	Abidin	Kesiapan dan kemampuan personil serta ketersediaan material pendukung, akan menentukan tingkat kesiapan dan kemampuan satuan dalam melaksanakan tugas
2	Peran dan fungsi pembinaan teritorial TNI AD dalam perbantuan pemerintah daerah : studi di kabupaten lebak (Kualitatif)	Ari Ganjar H, Kuntum C.U dan S. Simanjuntak	Peran dan fungsi militer dalam perbantuan kepada pemerintah menopang terlaksananya program program pemerintah daerah, serta turut menciptakan stabilitas nasional
3	Problematika Tugas Perbantuan TNI, (Kualitatif)	Diandra M.M	Persoalan tugas perbantuan militer saat ini menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Perlahan tapi pasti keterlibatan militer keranah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri terus terjadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu proses berfikir secara logis yang akan menguraikan masalah yang hendak diangkat dihadapkan pada berbagai hal diantaranya penyebab terjadinya permasalahan untuk menemukan akar persoalan; faktor-faktor yang berpengaruh baik bersifat positif maupun negatif; teori-teori maupun konsep-konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dihadapkan pada ketentuan yang harus dipatuhi untuk dapat menemukan sebuah kesimpulan dan pada akhirnya tercapai sasaran yang hendak diinginkan atau dituju, maka kerangka pemikiran penelitian telah disusun dalam Gambar 2.1 sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan gambar

Sebuah fenomena menurunnya profesionalisme prajurit Brigif 2 Marinir, diakibatkan dari penugasan OMSP yang dilaksanakan, sehingga berakibat kurangnya waktu latihan kemiliteran. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan kesiapan OMP dan menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu bagaimana dampak penugasan OMSP bagi prajurit Brigif 2 Marinir ;

bagaimana kesiapan OMP prajurit Brigif 2 Marinir. Dari tiga pertanyaan itu dianalisa dengan menggunakan beberapa teori, sehingga diketahui formula jawaban dan dijadikan pedoman dalam pembinaan prajurit, supaya prajurit menjadi profesional dan siap mendukung pelaksanaan OMP dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Moleong (2016 h 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda ilmiah. Proses berfikirnya adalah secara induktif. Proses induktif mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang tema dan data base penelitian hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh (Creswell, 2014). Merujuk pada penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menangkap berbagai fakta dan menganalisa suatu fenomena yang diteliti yaitu tentang evaluasi dampak penugasan non tempur, secara induktif untuk memperoleh data yang bersifat menyeluruh dan mendalam. Sementara menurut Kirk dan Miller (1986, h 6) dalam Moleong (2016, h 2) dikatakan bahwa penelitian kualitatif bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantatif melibatkan pengukuran suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu harus mengetahui apa yang menjadi ciri dengan mencatat atau menghitung mulai dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Berdasar pertimbangan yang dangkal yang demikian, kemudian dinyatakan bahwa penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan, sementara kualitatif tidak.

Pemilihan metode ini juga diharapkan dapat memberikan uraian yang jelas, akurat, faktual, sistematis, dan valid tentang evaluasi dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan OMP prajurit Brigade Infantri 2 Marinir. Data dalam metode kualitatif dinyatakan

dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi secara langsung dengan mengamati gejala/fenomena tentang fokus penelitian, melalui wawancara dengan bertanya langsung kepada informan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dan informasi yang diperlukan dalam mendukung analisis penelitian. Selain itu melalui studi pustaka untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dengan cara penelaahan dan membandingkan berbagai sumber kepustakaan yang terdiri dari buku, jurnal, dokumen resmi, media dan elektronik untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.

3.2 Sumber Data /Subyek /Obyek Penelitian.

3.2.1 Sumber data penelitian.

Menurut Lofland (1984; 47) dalam Moleong (2016; 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer atau utama diperoleh dari beberapa informan atau narasumber pada institusi Brigade Infantri 2 Marinir, Pasmar 2 Marinir, Korps Marinir dan Markas Besar Angkatan Laut.

Selanjutnya pelaksanaan penelitian dan pencarian data melalui wawancara dilakukan kepada para pejabat pada ketiga institusi tersebut. Di samping itu peneliti juga akan menggali dan mengumpulkan data-data berupa laporan dan dokumen-dokumen sebagai data sekunder, yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

Sumber data sekunder berupa pendapat para nara sumber yang terkait dengan evaluasi dampak penugasan non tempur yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah dan laporan penelitian. Selain bersumber dari para nara sumber, data

sekunder juga diperoleh dari undang undang, riset media, jurnal dan tulisan yang sesuai dengan penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan maupun informasi atau keterangan yang diberikan dan dikumpulkan secara utuh tanpa adanya suatu tanggapan atau persepsi dari penulis.

3.2.2 Subyek Penelitian.

Subyek dari penelitian ini adalah para informan berkompeten yang akan memberikan informasi terkait pelaksanaan penelitian tentang dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan OMP prajurit yang ada di Brigade Infantri 2 Marinir .

3.2.3 Obyek Penelitian.

Obyek dari penelitian ini difokuskan pada evaluasi dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan OMP prajurit Brigade Infantri 2 Marinir, serta faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk akan dilihat peluang dan kendala dari operasi OMSP yang selama ini dilakukan

3.3 Teknik Pengumpulan Data.

Guna memperoleh data dan informasi yang dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan terhadap obyek yang diteliti, maka diperlukan teknik-teknik dalam pengumpulan data yang diperlukan. Hal ini sesuai yang disampaikan Burhan Bungin (2011;110) mengenai teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Secara umum metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua pengumpulan data dan teknis analisis data adalah metode wawancara mendalam, metode observasi partisipasi, metode bahan dokumenter serta metode metode baru seperti bahan visual dan metode penelusuran bahan internet atau data online. Untuk lebih fokus dan terarah dalam pelaksanaan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.3.1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis teknik wawancara, khususnya Wawancara mendalam (*deep interview*). Menurut Creswell (2013; 227) menyatakan teknik ini merupakan langkah awal dari teknik pengumpulan data yang khas dari penelitian kualitatif. Guna memperoleh informasi maupun data yang lebih mendalam tentang informan atau narasumber yang dijadikan responden, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan mewakili tingkatan yang ada dalam obyek penelitian.

Penggunaan metoda wawancara ini dapat memberikan informasi dan hasil yang sebanyak-banyaknya tentang evaluasi dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan OMP prajurit Brigade infantri 2 marinir. Melalui penggunaan wawancara, diharapkan peneliti akan cepat mendapat informasi, dan data yang diinginkan. Pada pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan peneliti sesuaikan dengan keadaan responden, hal ini dilakukan supaya tidak ada satu pertanyaan yang terlewatkan, termasuk pembuatan kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan, hal ini membantu peneliti untuk memperoleh informasi, bahan keterangan atau informasi dan gambaran yang lebih riil serta obyektif tentang obyek yang diteliti. Wawancara ini ditujukan kepada unsur pimpinan/staf Korps marinir, Kepala dinas operasi dan latihan TNI AL (Kadisopslatal), Pasmar 2 Marinir dan Brigade Infantri 2 Marinir, sebagai sumber utama. Sesuai daftar informan pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No	Informan	Satuan	Kode
1	Dankormar	Mako Kormar	1A
2	Kadisopslatal	Mabesal	1A
3	Dan Pasmarr 2	Pasmarr 2	1A
4	Asops Kormar	Mako Kormarr	1B
5	Aspers Kormar	Mako Kormar	1B
6	Dan Kolatmar	Mako Kolatmar	1B
7	Dan Brigif 2 Mar	Brigif 2 Mar	1C
8	Pasops Brigif 2 Mar	Brigif 2 Mar	1C

Sumber : diolah oleh peneliti.

3.3.2. Observasi

Observasi mengharuskan peneliti untuk turun langsung kelapangan melakukan pengamatan terhadap pelaku serta aktifitas narasumber/informan dalam lingkungannya. Ada beberapa alasan dalam penelitian kualitatif pengamatan (observasi) dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981; 191-193) dalam Moleong (2016; 174) sebagai berikut :

Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. Observasi merupakan alat yang paling ampuh untuk mengetes suatu kebenaran.

Kedua, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Ketiga, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dan data.

Keempat, jalan terbaik untuk mengecek dan memperoleh jawaban atas keraguan pada data yang dijangkau dari hasil wawancara.

Kelima, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks.

Keenam, ketika teknik komunikasi tidak dimungkinkan maka pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Dengan demikian pengamatan (observasi) secara metodologis dapat berguna untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan peneliti menjadi sumber data. Pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek.

3.3.3. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan membandingkan beberapa dokumen sebagai referensi atau literatur maupun tulisan-tulisan yang terkait dengan permasalahan dan obyek penelitian. Metode penelitian terhadap dokumen dilakukan berdasarkan asumsi bahwa evaluasi dampak penugasan OMSP yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan untuk membantu kesiapan OMP Prajurit Brigade infanteri 2 Marinir terhadap penugasan-penugasan yang akan datang. Peneliti juga memanfaatkan media online untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian, menurut Burhan Bungin, (2011; 127) perkembangan internet yang sudah semakin maju memungkinkan para akademisi memanfaatkan media online atau internet untuk melakukan penelusuran berbagai informasi, mulai dari informasi teoritis maupun data-data primer ataupun sekunder yang diinginkan peneliti untuk kebutuhan penelitian.

3.4 Teknik Analisis data

Analisis data Menurut Bogdan dan Biklen 1982 dalam Moleong (2016; 248) mengatakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

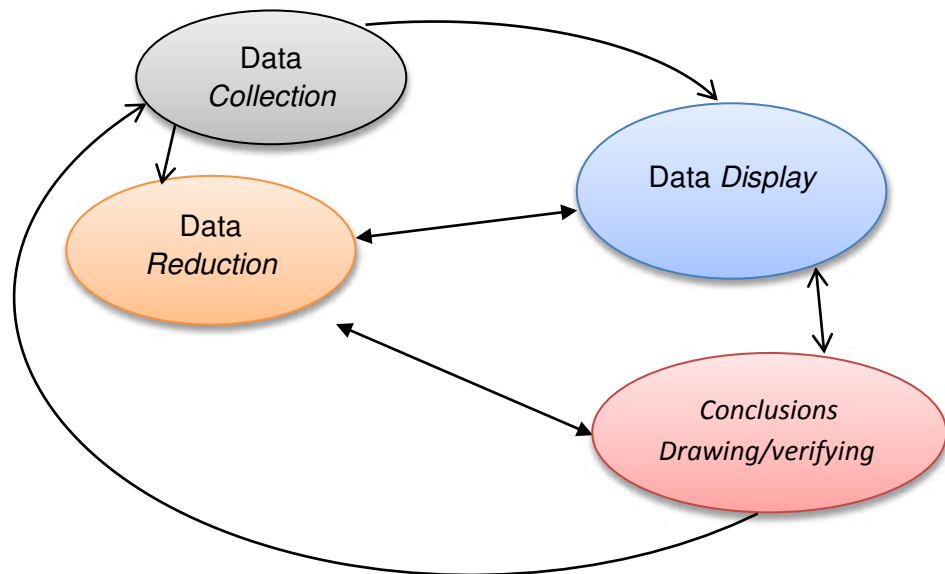
mensitesakannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sementara menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Burhan Bungin (2011; 149) menjelaskan analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, Memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tahapan analisis ini merupakan tahapan yang dilaksanakan peneliti pada setiap tahapan penelitiannya. Langkah ini bukan merupakan teknis analisis data kualitatif melainkan sebuah strategi analisis data yang melekat pada setiap tahapan langkah penelitian kualitatif, sedangkan metode atau teknik analisis kualitatif adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data (beberapa alat hanya untuk pengumpulan data saja) dan sekaligus juga adalah alat analisis data.

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, seperti apa yang dikatakan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2014; 334) bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, karena pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu.

Dan sekian pendapat ahil yang dikemukakan secara ringkas dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar seperti apa yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2014) bahwa aktivitas analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, *data conclusion drawing/ verification*. Langkah-langkahnya ditunjukkan pada gambar 3. 2, sebagai berikut.

Gambar 3. 2. Langkah-langkah analisis data



Sumber Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2014)

Pengolahan data seperti yang disampaikan diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.4.1 Pengumpulan Data (*Data Collection*) pengumpulan data dilakukan ketika peneliti terjun kelapangan, yakni sejak peneliti mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan dan pencatatan data sumber. Pada saat wawancara peneliti melakukan analisis terhadap jawaban dan informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Analisis data dilakukan secara interaktif berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

3.4.2 Penyajian Data (*Data Display Process*).

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan adalah dalam teks yang bersifat matrik. Sehingga

susunan informasi memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan, untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.

3.4.3 Reduksi Data (*Data Reduction Process*),

Mereduksi data berarti merangkum, memilih data-data pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya,. Reduksi data bertujuan untuk memberikan suatu deskripsi secara umum yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk yang lebih spesifik guna menghasilkan analisa yang akurat tentang evaluasi dampak penugasan OMSP terhadap kesiapan OMP prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir. Pada bagian ini merupakan proses analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.

3.4.4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verifying*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga pada tahap ini merupakan suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat. Pada tahap ini akan diperoleh suatu gambaran kondisi riil tentang peluang maupun kendala dari dampak penugasan OMSP bagi prajurit, serta sebagai bahan pembanding yang dapat digunakan untuk mengukur kesiapan melaksanakan OMP bagi Prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir.

3.5. Prosedur Penelitian.

Instrumen penelitian berupa alat bantu utama yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian berupa instrument penelitian, data primer, data sekunder diperoleh dari pengumpulan dokumen yang selanjutnya data-data tersebut diuji untuk mendapatkan keabsahan data.

3.5.1. Instrumen Penelitian.

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan instrumen, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji sintesa diperoleh melalui instrumen. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagai datanya. Data yang salah atau tidak menggambarkan data empiris bisa menyesatkan peneliti, sehingga kesimpulan penelitian yang ditarik/dibuat oleh peneliti bisa keliru.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian adalah sebagai berikut: analisis variabel penelitian yakni mengkaji variabel menjadi subpenelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan; menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel/subvariabel indikator indikatornya, menyusun kisi-kisi atau lay out instrumen. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, kapabilitas yang diukur, jenis dan jumlah pertanyaan, waktu yang dibutuhkan; menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Setiap item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya, prakiraan jawaban yang betul/diinginkan harus dibuat peneliti.

Prosedur yang ditempuh dalam pengadaan instrumen yang baik adalah: Perencanaan meliputi perumusan tujuan, menentukan variabel, kategorisasi variable, Penulisan butir atau item kuesioner, penyusunan skala, penyusunan pedoman wawancara, Penyuntingan

yaitu melengkapi instrumen dengan pedoman mengerjakan surat pengantar kunci jawaban dan lain lain, Uji-coba baik dalam skala kecil maupun besar, Penganalisaan hasil meliputi analisis item dengan melihat pola jawaban peninjauan saran-saran dan sebagainya dan mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang baik, dengan mendasarkan diri pada data yang diperoleh sewaktu uji-coba.

3.5.2 Data Primer.

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama yang harus secara langsung diambil dari sumber aslinya. Rencana sumber data primer terdiri Dan Kormar, Kadis Opslatal, Dan Pasmar 2, Dan Kolatmar, Asops Dankormar, Aspers Dankormar, Dan Brigif dan Perwira Staf Operasi Brigif, tersebut diatas merupakan nara sumber yang tepat dan kompeten yang peneliti jadikan responden dalam peneiltian.

3.5.3 Data Sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histonis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Dalam hai ini sumber data sekunder adalah berupa data dokumenter dapat berupa hasil penelitian, laporan, dan catatan-catatan, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya yang diarsipkan maupun yang dipublikasikan. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen-dokumen terkait isu yang diteliti baik dokumen publik seperti makalah, laporan ataupun dokumen yang sifatnya privat seperti buku harian, surat, email, yang tentunya sebelumnya sudah diijinkan untuk diakses.

3.5.4. Pengujian keabsahan dan Keterandaian Data.

Menurut Bungin (2011), keabsahan dan keterandalan data sangat memengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan dengan teknik pengecekan data triangulasi. Data yang telah diperoleh dideskripsikan dan dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda, dan spesifik dari sumber-sumber data tersebut.

3.6 Dampak.

Dampak adalah sesuatu yang bersifat objektif. Dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal yang sangat penting dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen. Dampak adalah pengaruh suatu kegiatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Sementara Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010) Bisa diartikan secara sederhana bahwa Dampak merupakan pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan atau atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pengertian dampak positif adalah suatu keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik, sementara pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk atau negatif.

Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin atau atasan yang baik sudah seleyaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambilnya, karena dampak merupakan akibat dari setiap keputusan yang diambil oleh setiap orang, yang dapat mempengaruhi tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga kelompok yang dipimpinnya, apabila dirinya merupakan pemimpin atau atasan dari kelompok tersebut. Pengaruh yang ditimbulkan bisa positif dan juga bisa negatif, hal ini tergantung dari situasi dan kondisi saat keputusan itu diambil.

3.7 Pelaksanaan Jadwal penelitian.

Penelitian ini telah dilaksanakan mulai, bulan Januari sampai dengan bulan September 2017, dengan jadwal kegiatan sesuai tabel 3. 4 sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Jadwal Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan								
		2017								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Studi Pendahuluan	■	■	■						
2	Penyiapan Proposal Penelitian		■	■						
3	Pengajuan Proposal Penelitian				■	■	■			
4	Pengujian Proposal						■			
5	Perbaikan Proposal						■	■		
6	Pengumpulan dan Pengolahan Data							■	■	■
7	Penyusunan Laporan								■	■
8	Konsultasi dan Bimbingan								■	■
9	Ujian Tesis									■
10	Perbaikan Tesis									■

Sumber : diolah oleh peneliti

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN DATA

4.1 Gambaran Subjek dan Objek Penelitian

4.1.1 Markas Komando Korps Marinir

Operasi militer selain perang merupakan operasi yang dilaksanakan bukan dalam rangka menghadapi agresi militer dari negara lain, tetapi untuk menghadapi ancaman dan gangguan keamanan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dengan beragam resiko dan dampaknya. Kemajuan perkembangan teknologi berbanding lurus dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan di masyarakat dan melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional. Berdasarkan Keppres No. 63/2004 tentang Objek Vital Nasional (Obvitnas) ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.
- b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional.
- c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. (obvitnas), seperti bandara, pelabuhan dan transportasi kereta api.

Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obvitnas, pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap sistem perekonomian dan mengganggu stabilitas nasional. Prajurit Brigif 2 Marinir diminta beberapa Kementerian/ Lembaga untuk mengamankan obvitnas yang dimaksud melalui MoU yang telah dibuat diantaranya adalah :

Tahun 2013 MOU TNI dan PT. PELNI, tentang bantuan pengamanan pelayaran dengan cara kerjasama pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Tahun 2015 MOU TNI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tentang bantuan pengamanan obyek vital di bandara laut dan semua yang

berada dibawah Kemenhub; kegiatan survei dan penerbitan buku; pelatihan SDM; membantu penegakkan hukum; pertukaran informasi.

Penugasan OMSP sesuai UU No 34/2004 ada 14 butir tugas dan menurut peneliti masih bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu

Pertama penugasan OMSP yang ada unsur tempurnya seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan dan implementasinya dapat berbentuk penugasan pengamanan pulau-pulau terluar, Satgas Apung Siaga Tempur Laut dan Satgas Operasi Tinombala Poso yang selama ini telah dan sedang dilakukan.

Kedua penugasan OMSP yang tidak ada unsur tempurnya seperti membantu ikut menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu Penanggulangan bencana alam, melaksanakan SAR, Pam KTT, Pam Demonstrasi, Pam lebaran, Pam KAI. Pam Pelabuhan dan Pam Bandara.

Tugas-tugas tersebut diatas, dilaksanakan oleh prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 2 dan Yonif 6 Brigif 2 Marinir secara bergantian, sementara Yonif 4 Brigif 2 Marinir sebagai Batalyon Tim Pendarat, dikhususkan untuk melaksanakan tugas OMP. Penugasan OMP merupakan operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lain, baik yang dilaksanakan melalui invasi, agresi ataupun infiltrasi. Menghadapi tugas seperti ini tidak ada cara lain kecuali berlatih dan berlatih sesuai tuntutan prajurit korps marinir sebagai pasukan pendarat, artinya prajurit Yonif 4 Brigif 2 Marinir harus siap sewaktu-waktu digerakkan melaksanakan operasi amfibi dalam rangka pelaksanaan tugas operasi militer untuk perang.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penugasan OMSP dan OMP tersebut diatas oleh prajurit Brigif 2 Marinir, peneliti melakukan penelitian, salah satunya ke Markas Komando Korps Marinir, dalam terminologi militer nama "Korps" berarti suatu kesatuan di atas tingkat divisi dengan tanda taktis XXX dan di bawah tingkat Komando Tempur atau tentara. Namun dalam tubuh Angkatan Laut, Korps Marinir dianggap

sebuah “*branch*” yang melengkapi isi TNI AL di samping Pelaut, Teknik, Elektro, Supply, Khusus, Kowal dan Kesehatan. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), didalamnya memuat struktur organisasi TNI AL bahwa Korps Marinir adalah sebuah Komando Utama (Kotama) yang sejajar dengan Kotama lain seperti Komando Amada Barat dan timur, Komando Lintas Laut Militer, Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL, Sekolah Staf dan Komando TNI AL dan Akademi Angkatan Laut. Sejarah prajurit marinir terlahir dari patriotisme pemuda yang menginginkan lepas dari belenggu kolonialisme dan sudah eksis sejak berkecamuknya perang kemerdekaan. Pada tanggal 15 Nopember 1945 prajurit Pangkalan IV Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Tegal menggunakan nama “*Corps Mariniers*” (tanggal inilah yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir Korps Marinir). Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan No A/565/1948 pada tanggal 9 Oktober 1948 ditetapkan adanya Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), tetapi kemudian kembali menggunakan nama Korps Marinir sesuai dengan Surat keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No Skep/1831/XI/1975 tanggal 15 Nopember 1975.

Seiring dengan berkembangnya jaman, terutama untuk menuju terbentuknya organisasi militer yang modern dan profesional, Korps Marinir baik secara organisasi maupun pembinaan kekuatannya mengalami beberapa perubahan. Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Korps Marinir yang dikutip dari Dinas Infomasi dan Pengumpulan Data Korps Mainir (2015) adalah sebagai berikut :

- a. Visi : Mewujudkan prajurit Korps Marinir sebagai pasukan pendarat yang bermoral, profesional dan dicintai rakyat.
- b. Misi : Untuk mewujudkan visi Korps Marinir dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta atas dasar kewenangan yang dimiliki organisasi, maka ditetapkan misi Korps marinir yang menjadi pedoman bagi semua unsur-unsur yang ada di jajarannya, supaya

pembinaan terhadap satuannya sesuai program yang ditentukan, adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya organisasi Korps Marinir yang kokoh dan dinamis sebagai wadah kegiatan pembinaan dan pengembangan satuan untuk senantiasa siap melaksanakan tugas operasi terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dari dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
- 2). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia prajurit Korps Marinir yang disiplin, bermoral dan bermartabat melalui program pendidikan yang sistematis, terukur, berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Meningkatkan jiwa korsa dan moril prajurit marinir melalui pembinaan perilaku dan tradisi korps, agar dapat menjadi contoh dan tauladan dimanapun berada.
- 4) Terwujudnya prajurit marinir yang bermoral, profesional dan dicintai rakyat, baik perorangan maupun satuan melalui sistem pembinaan latihan secara bertingkat dan berlanjut serta latihan gabungan TNI AL / TNI maupun latihan bersama dengan negara lain.
- 5) Meningkatkan kepemimpinan militer dalam tubuh organisasi Korps Marinir yang berwawasan ke depan melalui sistem penilaian yang selektif.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya, berupa pemenuhan hak-hak prajurit, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kinerja prajurit.
- 7) Terpenuhinya perlengkapan dan material tempur yang modern, sesuai dengan standar Korps Marinir guna melengkapi kebutuhan, serta mengganti material alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah melampui batas usia pakai.
- 8) Peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan tuntutan Korps Marinir melalui

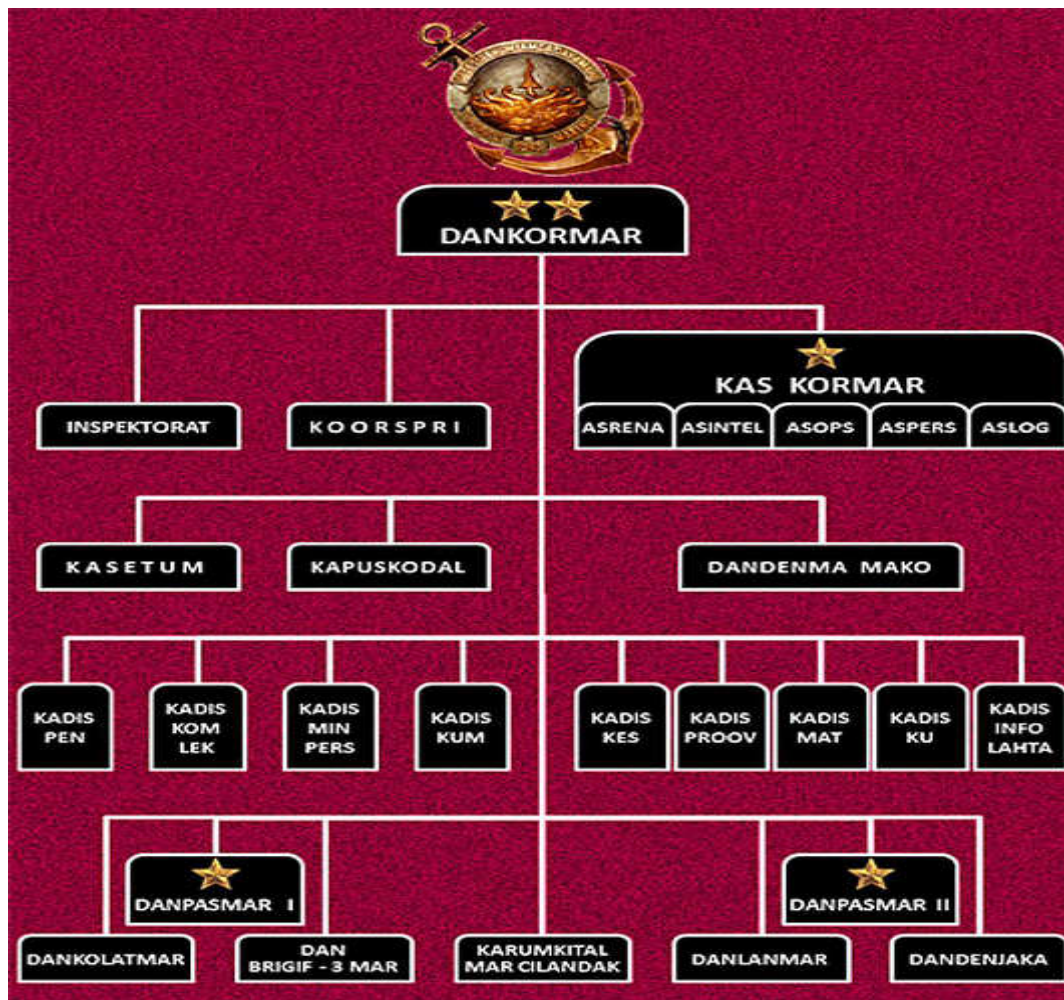
kerjasama pendidikan, pengkajian dan penilaian internal maupun eksternal.

Prajurit Korps Marinir dipimpin oleh seorang Komandan Korps Marinir (Dankormar) berbintang dua dengan tugas sebagai pembantu dan pelaksana utama Kasal dalam penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional satuan Marinir sebagai pasukan pendarat amfibi TNI AL dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut, operasi pertahanan pantai di pulau-pulau strategis serta operasi lainnya sesuai kebijakan Panglima TNI, dengan tugas kewajiban yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

- a Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasal, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b Menetapkan dan menjamin terlaksananya rencana dan program bidang pembinaan kekuatan, kesiagaan, administrasi dan logistik serta Pembinaan Potensi Nasional menjadi Kekuatan Keamanan Negara di bidang Maritim (Binpotnaskuatmar) sesuai rencana dan program TNI Angkatan Laut.
- c Menentukan dan melaksanakan rencana pembinaan seluruh jajaran Kormar meliputi pembinaan kekuatan dan kemampuan Kormar sebagai pasukan pendarat dalam rangka operasi pendaratan amfibi.
- d. Memimpin Kormar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bidang pembinaan kekuatan, kesiapan dan kemampuan Kormar dalam rangka penyelenggaraan operasi amfibi serta operasi tempur lainnya berdasarkan kebijakan Panglima TNI.
- e. Menyiapkan rencana dan program kesiapan operasional Marinir dalam rangka pelaksanaan tugas operasi yang dibebankan oleh Panglima TNI.
- f Menetapkan rencana dan program bidang pembinaan kekuatan, kesiapan operasi, administrasi dan manajemen serta logistik sesuai rencana dan program TNI Angkatan Laut.

- g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Kormar guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasil guna dan berdaya guna. Struktur Jabatan Korps Marinir bisa dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut.

GAMBAR 4.3 STRUKTUR JABATAN KORPS MARINIR



Sumber : Organisasi dan Prosedur Korps Marinir No Kep 156/1X/2017

Di Mako Kormar peneliti secara khusus memfokuskan penelitian kepada narasumber Dankormar dan dua staf pembantunya yaitu Asisten Operasi (Asops) dan Asisten personil (Aspers), hal ini dilakukan karena pelaksanaan tugas OMP maupun OMSP bagi satuan di bawah Korps Marinir, selalu berkaitan dengan kedua bidang tersebut. Asops dijabat

oleh seorang Perwira Menengah TNI Angkatan Laut berpangkat Kolonel merupakan unsur staf pembantu Dankormar dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan Dankormar bidang pembinaan kekuatan, dan kemampuan untuk mendukung kebutuhan operasi dan latihan termasuk taktik dan teknik serta pembinaan informasi operasi. Dalam melaksanakan tugas, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Merumuskan, menyusun dan menyiapkan kebijakan pembinaan kekuatan dan kemampuan Kormar.
- b. Menyusun dan menyiapkan rencana dan program pembinaan bidang operasi dan latihan termasuk taktik, teknik dan pembinaan informasi operasi.
- c. Menyusun dan menyiapkan petunjuk dalam rangka pelaksanaan operasi, latihan, taktik, teknik dan pembinaan informasi operasi.
- d. Menyusun dan menyiapkan Perkiraan Kebutuhan Kekuatan (Kirbutkuat) dalam rangka perencanaan strategik tingkat Kotama.
- e. Mengarahkan operasi dan latihan unsur-unsur Marinir yang menyangkut taktik, teknik dan prosedur operasi serta informasi operasi.
- f. Mengarahkan Kolatmar dalam melaksanakan latihan pasukan pendarat bagi unsur-unsur TNI lainnya.
- g. Menyusun petunjuk tentang pembinaan kemampuan teknis Marinir bagi personel, unsur dan satuan Marinir yang berada di luar Kotama.
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan komando, badan dan instansi baik di dalam maupun di luar Kormar untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.
- i. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program Sops Kormar, guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasilguna dan berdayaguna.

- j. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dankormar khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Sementara Aspers dijabat oleh seorang Perwira Menengah TNI Angkatan Laut berpangkat Kolonel merupakan unsur staf pembantu Dankormar dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan Dankormar bidang pembinaan personel militer dan sipil Kormar. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban sebagai berikut :

- a. Merumuskan, menyusun dan menyiapkan kebijakan kebutuhan personel Marinir baik Militer maupun Pegawai Negeri Sipil.
- b. Merumuskan, menyusun dan menyiapkan kebijakan administrasi personel Marinir integrasi dengan pembinaan administrasi personel TNI Angkatan Laut.
- c. Merumuskan, menyusun dan menyiapkan kebijakan pembinaan pendidikan dan perawatan personel Marinir meliputi kesehatan, mental, hukum, disiplin, sejarah, jasmani dan rekreasi serta pelayanan personel.
- d. Menyusun dan menyiapkan rencana dan program pembinaan personel Marinir meliputi pendidikan, klasifikasi, penggunaan, perawatan dan pemisahan personel berdasarkan rencana dan program TNI Angkatan Laut.
- e. Menyusun dan menyiapkan petunjuk-petunjuk dalam rangka pelaksanaan pembinaan personel yang meliputi pendidikan, penggunaan, klasifikasi, perawatan dan pemisahan personel sesuai lingkup Kormar.
- f. Menyusun dan menyiapkan perkiraan personel dalam rangka perencanaan strategik tingkat Kotama.
- g. Menyusun dan menyiapkan perkiraan personel dalam rangka pelaksanaan operasi bagi unsur-unsur Kormar.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan komando, badan dan instansi baik di dalam maupun di luar Kormar untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.

- i Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan personel Marinir guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasilguna dan berdayaguna.
- j Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dankormar khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

4.1.2 Dinas Operasi dan Latihan TNI AL

Dinas Operasi dan Latihan TNI AL (Disopslatal) adalah badan pelaksana pusat TNI AL yang berkedudukan langsung di bawah Kasal yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan kesiapan dan kemampuan bidang operasi, latihan, dukungan operasi dan latihan, strategi dan taktik operasi serta pembinaan korps pelaut, dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan teknis kemampuan dan kesiapan operasional satuan dalam penggunaan Alutsista untuk tugas-tugas operasi dan misi pemelihara perdamaian dunia (*Peace Keeping Operation*) sesuai kebijakan teknis Kasal di bidang Operasi dan Latihan.
- b. Merencanakan program dan kegiatan Disopslatal dalam bidang Operasi, Latihan, Pembinaan Personel Korps Pelaut, Dukungan Operasi, Kerjasama Militer dan non-Militer serta Taktik Operasi TNI AL secara berlanjut.
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan latihan baik yang bersifat satuan, gabungan, dan bersama dengan matra TNI dan instansi pemerintah lainnya serta Angkatan Laut negara lain dalam rangka terwujudnya kesiapan operasional satuan.
- d. Melaksanakan pembinaan teknis dukungan operasi dan latihan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas TNI AL;
- e. Mengembangkan, merumuskan dan menyiapkan petunjuk-petunjuk dalam bidang Operasi, Latihan, Pembinaan Personel Korps Pelaut, Dukungan Operasi, Kerjasama Militer dan non-Militer serta Taktik

Operasi TNI AL berdasarkan petunjuk pembinaan operasi dan latihan TNI AL;

- f. Menyusun kebutuhan serta pembinaan kesiapan personel korps pelaut guna tugas-tugas operasi, latihan, dan pendidikan;
- g. Melaksanakan evaluasi bidang Operasi, Latihan, Pembinaan Personel Korps Pelaut, Dukungan Operasi, Kerjasama Militer dan non-Militer serta Taktik Operasi TNI AL;
- h. Melaksanakan pembinaan latihan perorangan, kualifikasi korps pelaut serta mengarahkan jenjang karier korps pelaut;
- i. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangannya;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi yang terkait di dalam dan di luar TNI Angkatan Laut; dan
- k. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasal khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

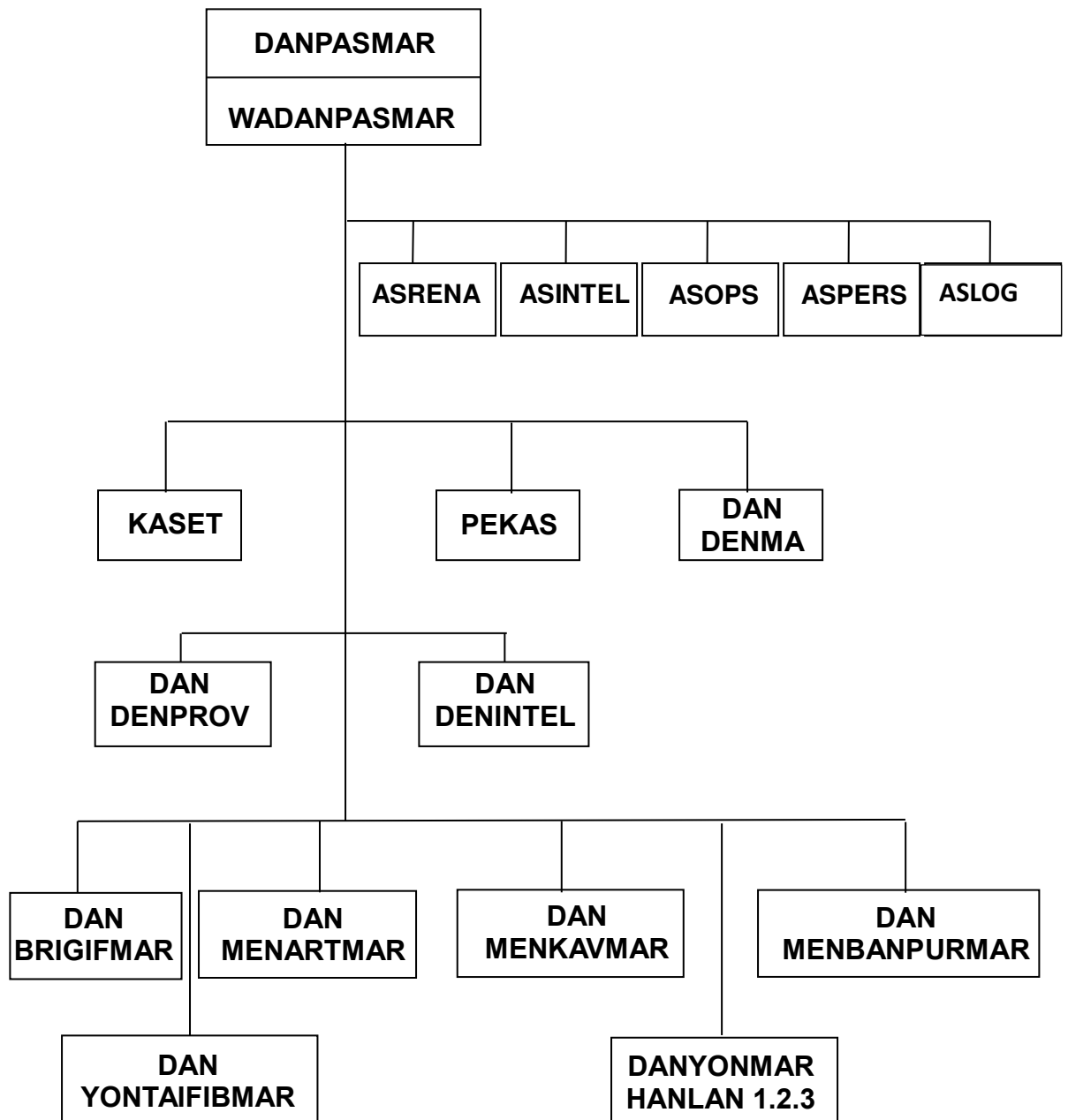
4.1.3 Markas Komando Pasmal 2 Marinir

Pasmal 2 Korps Marinir berdiri pada tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor Keputusan 03 /II/2004, tgl 13 Febuari 2004 tentang Berdirinya Organisasi Pasmal 2 Korps Marinir. Komandan Pasmal 2 Korps Marinir dijabat oleh seorang Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat Brigadir Jenderal (Bintang Satu), merupakan komando pelaksana utama yang bertugas pokok membina kemampuan dan menyiapkan kekuatan tempur unsur-unsurnya dalam melaksanakan operasi pendaratan amfibi, pertahanan pangkalan TNI Angkatan Laut, operasi pertahanan pantai di pulau-pulau terluar/strategis serta tugas-tugas operasi lainnya. Dalam melaksanakan tugas, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program pembinaan Pasmal berdasarkan rencana dan program Kormar.
- b. Melaksanakan pembinaan kekuatan seluruh jajarannya termasuk sarana dan prasarana pendukungnya.

- c. Menyelenggarakan dan melaksanakan latihan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan serta kesiapan tempur.
- d. Mengumpulkan data latihan sebagai bahan pengajuan saran untuk mengembangkan taktik, teknik dan prosedur.
- e. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Pasmarguna menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
- f. Membina dan menyiapkan kekuatan kemampuan serta unsur-unsur pertahanan pangkalan TNI Angkatan Laut.
- g. Mengkoordinasikan penyiapan satuan tugas tempur dalam rangka operasi pendaratan amfibi, operasi pertahanan pantai dan atau operasi yang terintegrasi dengan satuan tugas TNI Angkatan Laut.
- h. Menyusun rencana tindakan guna menghadapi kontinjensi berdasarkan kebijakan Dankormar.
- i. Melaksanakan operasi tempur dan tugas-tugas pengamanan wilayah darat dan atau pantai sesuai kebijakan Panglima TNI.
- j. Menyusun dan menyiapkan kekuatan tempur termasuk penentuan sarana dan prasarana untuk kebutuhan operasi.
- k. Menyiapkan Markas Pasmarguna untuk mampu melaksanakan tugas sebagai Markas Brigat dalam penyelenggaraan operasi dan latihan pendaratan amfibi.
- l. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dankormar khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- m. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan komando, badan dan instansi diluar Kormar.
- n. Sebagai unsur pasukan pemukul cadangan strategis TNI Angkatan Laut. Struktur Jabatan Pasmarguna 2 bisa dilihat pada gambar 4.4 sebagai berikut.

GAMBAR 4.4 STRUKTUR JABATAN PASMAR 2 KORPS MARINIR



Sumber : Organisasi dan Prosedur Korps Marinir No Kep 156/1X/2017

4.1.4 Komando Latih Marinir

Komando Latih Marinir disingkat Kolatmar adalah Komando Pelaksana Kormar bertugas membina dan meningkatkan kemampuan militer sebagai pasukan pendarat (Pasrat) yang memiliki kemampuan

operasi darat, operasi amfibi, operasi khusus serta operasi lainnya. Kolatmar dipimpin oleh Komandan Komando Latih Marinir disingkat Dankolatmar, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dankormar. Dankolatmar dijabat oleh seorang Perwira Menengah TNI Angkatan Laut berpangkat Kolonel Marinir. Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kolatmar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab bidang latihan, penelitian, pengujian dan pengembangan taktik dan prosedur operasi amfibi, operasi darat, operasi khusus serta operasi lainnya.
- b. Menentukan dan menjamin kesiapan unsur-unsur Kolatmar untuk menyelenggarakan dan melaksanakan latihan, penelitian, pengujian, pengkajian dan pengembangan taktik dan prosedur Marinir sebagai pasukan pendarat maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi lainnya.
- c. Menjamin terlaksananya program Kolatmar guna pembinaan kekuatan dan kemampuan Kolatmar sesuai rencana dan program Kormar. Mengendalikan pelaksanaan program Kolatmar guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasilguna dan berdayaguna.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan komando, badan dan instansi baik di dalam maupun di luar Kormar untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya sesuai tingkat dan lingkup kewenangannya.
- e. Menyelenggarakan pembinaan disiplin hukum, dan tata tertib serta bantuan hukum sesuai lingkup kewenangannya.
- f. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Dankormar khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

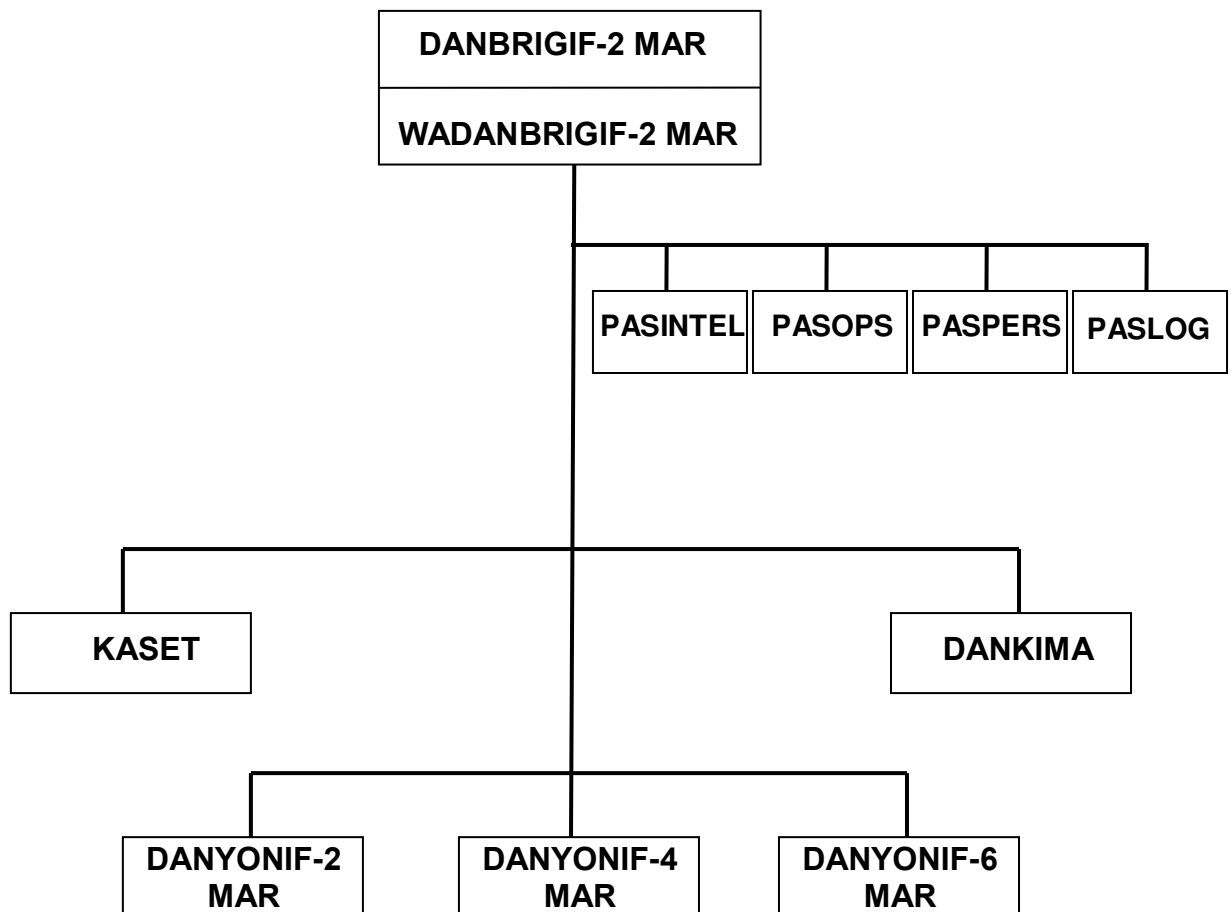
4.1.5 Objek Penelitian Markas Brigade Infanteri 2 Marinir

Menurut Orgaspros Pasmars 2 (2017) Brigade Infanteri-2 Marinir (Brigif-2 Mar) merupakan salah satu satuan pelaksana Pasmars-2 yang mempunyai tugas kewajiban membina kemampuan dan menyiapkan kekuatan tempur unsur-unsurnya dalam melaksanakan operasi pendaratan amfibi, pertahanan pangkalan TNI AL, operasi pertahanan pantai di pulau-pulau strategis serta tugas-tugas operasi tempur lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Brigif 2 Mar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut :

- a. Membina kesiapsiagaan operasional, yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan latihan Operasi Amfibi mulai tingkat Batalyon Tim Pendarat (BTP) sampai dengan Brigade Pendarat.(BRIGRAT)
- b. Menyiapkan kesiapan satuan untuk mendukung penugasan satuan-satuan Marinir yang akan melaksanakan operasi-operasi antara lain:
 - 1) Operasi Represif. Menyiapkan kekuatan untuk siaga operasional BTP yang tergabung dalam satuan tugas laut Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, Opsai Trisila wilayah barat dan Operasi Gabungan TNI
 - 2) Operasi Prioritas. Menyiapkan kekuatan untuk mengamankan pulau-pulau terluar Indonesai.
 - 3) Operasi Preventif. Menyiapkan operasi intelijen dari satuan-satuannya untuk bertugas di daerah-daerah rawan konflik seperti Aceh, Poso, Kalimantan dan Papua di bawah kendali BAIS TNI.
 - 4) Operasi Sasaran Terpilih. Menyiapkan kekuatan untuk melaksanakan tugas pengamanan VIP, VVIP dan Objek Vital termasuk tugas pertolongan/SAR
 - 5) Operasi Penanggulangan Bencana Alam. Membina kemampuan dan menyelenggarakan kesiapan operasional tergabung dalam Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRCPB) TNI
 - 6) Operasi Internasional di bawah PBB. Menyiapkan kekuatan satuan-satuan Brigif 2 Mar yang diproyeksikan dalam operasi

pemelihara perdamaian. Struktur jabatan Brigif 2 Marinir dapat dilihat pada Gambar 4.5 sebagai berikut.

GAMBAR 4. 5 STRUKTUR JABATAN BRIGIF-2 MAR



Sumber : Organisasi dan Prosedur Korps Marinir No Kep 156/1X/2017

4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil

4.2.1 Bagaimanakah Dampak Penugasan Operasi Militer Selain Perang.

Amanat UU No 34/2004 tentang TNI mengatur tugas pokok TNI melalui OMP dan OMSP. Pelaksanaan tugas OMSP merupakan operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka pertempuran dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas-tugas lain seperti yang

terdapat dalam 14 penugasan yang mendapatkan legitimasi UU yaitu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Penyelenggaraan tugas negara yang dilakukan oleh TNI ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Prajurit TNI harus disiplin dan profesional dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan OMSP, karena bersinggungan secara langsung dengan kalayak ramai, jika merugikan masyarakat, TNI dapat saja dihujat seperti pada masa awal tumbangnya orde baru, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi TNI selaku komponen utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta. MoU antara pimpinan TNI dan pimpinan Kementerian Perhubungan terkait pengamanan objek vital seperti Pengamanan Bandara, Pelabuhan laut dan Kereta api merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan bangsa di masa damai, implementasinya harus dapat dilaksanakan dengan baik dan personil yang terlibat disiapkan serta diberikan cukup pembekalan tentang tugas yang akan dihadapi. Hal ini menjadi perhatian bagi pimpinan Korps Marinir dalam pengerahan pasukannya untuk melaksanakan tugas perbantuan kepada

kementerian dan lembaga seperti tugas tersebut diatas dan tugas perbantuan lainnya. Menurut Komandan Korps Marinir dikatakan bahwa prajurit marinir dalam melaksanakan tugas selalu perpedoman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam melaksanakan penugasan OMSP. Setiap penugasan baik tugas OMP ataupun OMSP, selalu mempunyai dampak, tidak terkecuali penugasan yang dilaksanakan oleh prajurit Brigif 2 Mar dalam membantu tugas Kementerian/ Lembaga. Komandan Pasmar 2 juga mengatakan bahwa ada dua dampak yang dapat ditimbulkan dari penugasan tersebut; yaitu :dampak positif dan dampak negatif.

a Dampak Positifnya adalah :

- 1) Dapat memberikan kegiatan bagi prajurit selama masa damai.
- 2) Dapat memberikan tambahan pengalaman bagi prajurit dalam melaksanakan OMSP.
- 3) Dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit.
- 4) Dapat meningkatkan kerjasama dan kordinasi serta Interoperability antar instansi (TNI, Polri dan lembaga-lembaga lainnya).

b. Dampak negatif yang mungkin dapat ditimbulkan adalah :

- 1) Dapat mempengaruhi menurunnya naluri tempur prajurit, dihadapkan dengan medan operasi yang dihadapi saat latihan maupun penugasan.
- 2)- Menurunnya skill tempur prajurit karena tidak bisa melaksanakan latihan rutin yang seharusnya dilaksanakan, seperti latihan menembak, renang, dan sebagainya.

Begitu juga seperti yang disampaikan oleh Asisten Operasi Komandan Korps Marinir, tentang penugasan yang selama ini dilaksanakan oleh Prajurit Marinir umumnya dan prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir khususnya, bahwa ada dampak dari penugasan OMSP yang dilakukan prajurit,

a. Dampak Positifnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menambah pengalaman penugasan bagi prajurit.
- 2) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi prajurit.

- 3) Prajurit dapat bersinergi dengan satuan lain dan masyarakat bahkan dari berbagai negara.
 - 4) Sebagai sarana mengasah dan menguji perencanaan, kemampuan, kekuatan, keahlian serta profesionalisme prajurit.
 - 5)- Dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit.
- b. Disamping dampak positif tersebut diatas menurutnya juga terdapat dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya penugasan OMSP yang selama ini dilakukan bagi prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir yaitu :
- 1) Lamanya waktu penugasan 6 bulan sampai 1 tahun, cenderung membuat prajurit lengah dan mengabaikan aturan yang berlaku, sehingga akan mengakibatkan penyimpangan dan pelanggaran norma–norma yang berlaku.
 - 2) Masih adanya kecelakaan kerja bagi prajurit yang sedang melaksanakan OMSP.
- Sementara itu perwira operasi Brigade Infanteri 2 marinir yang kesehariannya bertugas menyusun dan menyiapkan program pembinaan prajurit yang ada diजारannya dalam bidang operasi dan latihan, termasuk taktik, tehnik dan pembinaan informasi operasi, juga mengatakan bahwa ada dampak positif dan negatif terhadap penugasan OMSP bagi prajurit.
- a. Dampak positifnya adalah :
- 1) Memunculkan pengalaman baru prajurit tentang medan penugasan OMSP.
 - 2) Memberikan sedikit nilai tambah prajurit khususnya di bidang ekonomi, dikarenakan adanya tunjangan tambahan bagi prajurit yang melaksanakan OMSP.
 - 3) Memberikan peluang kepada prajurit yang memiliki keahlian tertentu (Medis, Konstruksi dll) untuk mengimplementasikan keahliannya tersebut sesuai dengan penugasannya.
- b. Dampak negatif yang mungkin ditimbulkan adalah :
- 1) Tidak menutup kemungkinan muncul gangguan psikologis kepada prajurit selesai melaksanakan OMSP.

- 2) Tidak terlatihnya naluri tempur prajurit, karena situasi dan kondisi di wilayah penugasan lebih banyak melaksanakan pengamanan yang sifatnya statis.

4.2.2 Bagaimanakah Kesiapan Operasi Militer untuk Perang.

Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diselenggarakan untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa, merupakan faktor paling dominan yang menjadi dasar dalam sistem pertahanan negara republik indonesia. Upaya yang dilakukan dalam pertahanan negara ditujukan untuk mencegah dan mengatasi ancaman baik yang berbentuk nyata maupun belum dan atau tidak nyata.

Setiap bentuk ancaman memiliki tingkat resiko yang berbeda, begitu juga pola penanganannya, sehingga perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan ancaman itu sendiri (Doktrin Haneg, Kemhan, 2015) dikatakan bahwa Ancaman pada hakikatnya merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman yang perlu diwaspadai saat ini dan ke depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman yang merupakan gabungan dari ancaman militer dan non militer yaitu ancaman hibrida.

Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa ancaman militer dalam bentuk agresi dan ancaman militer bukan agresi. Agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata negara lain untuk melakukan pendudukan, dalam hal ini mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Agresi yang dilakukan oleh negara lain merupakan jenis ancaman yang paling serius,

hal ini didasarkan pada pertimbangan kemungkinan resiko yang ditimbulkannya Agresi sangat membahayakan karena mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Agresi dapat membubarkan suatu negara, sehingga pertahanan negara harus dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman agresi. Sesuai buku doktrin pertahanan negara, bentuk-bentuk agresi dapat digolongkan yaitu:

- a. Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.
- b. Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.
- c. Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain.
- d. Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, satuan laut atau satuan udara TNI.
- e. Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah NKRI berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut.
- f. Tindakan suatu negara yang mengizinkan pengunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap NKRI.
- g. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI.

Sementara ancaman bukan agresi merupakan ancaman yang dapat menggunakan kekuatan senjata ataupun tidak bersenjata, berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri serta dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, antara lain yaitu Pelanggaran Wilayah, Spionase, Sabotase, Terorisme, Pemberontakan Bersenjata, Konflik Komunal/ Perang Saudara

Prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir merupakan bagian dari institusi Korps Marinir, merupakan instrumen militer yang juga bersama komponen

lain harus melindungi negara dan bangsa dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh negara atau negara-negara lain dengan cara menghadang atau menghancurkan secara bertahap, mulai dari ketika mereka bergerak dari negaranya, ketika mereka berada diperjalanan menuju negara kita serta ketika mereka berhasil menduduki sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap prajurit Brigif 2 Mar untuk selalu siap, menghadapi situasi apapun demi kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa serta negara republik indonesia. Seperti disampaikan oleh beberapa narasumber, bahwa prajurit Korps Marinir dimanapun berada selalu disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Perang, melalui adanya latihan rutin baik yang bertahap, bertingkat dan berlanjut maupun latihan bertahap bertingkat tidak berlanjut, diharapkan kesiapan personel maupun material tempur prajurit Brigif 2 Korps Marinir dapat terpelihara dengan baik, seperti;

- a. Melaksanakan latihan rutin baik perorangan maupun satuan
- b. Melaksanakan apel kesiapsiagaan operasional baik personil maupun materialnya yang rutin dilaksanakan.

Sementara Asisten Operasi Komandan Korps marinir yang mempunyai tugas menyusun, menyiapkan rencana dan program pembinaan bidang operasi dan latihan termasuk taktik, teknik dan pembinaan informasi operasi, mengatakan bahwa kesiapan Operasi Militer Untuk Perang mutlak bagi seluruh prajurit Korps Marinir tidak terkecuali prajurit Brigif 2 Marinir, untuk meyakinkan bahwa satuan bawah melaksanakan kesiapan OMP dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Monitoring kesiapan personil dan material terhadap pelaksanaan OMP secara rutin.
- b. Melaksanakan latihan–latihan yang menunjang kegiatan OMP.
- c. Melaksanakan pembinaan kesiapan alat utama sistem pertahanan secara optimal.

- d Melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan operasi dan latihan.(Data laporan bulanan kesiapan personil dan material korps marinir)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Dampak Penugasan Operasi Militer Selain Perang Bagi Prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigade Infanteri 2 Marinir

Penugasan OMSP yang dilakukan oleh prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigif 2 Marinir di berbagai tempat seperti misalnya pengamanan objek vital Pelabuhan, Bandara Udara dan Kereta Api serta tugas perbantuan lainnya disejumlah Kementerian/Lembaga, merupakan implementasi dari *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dibuat oleh pimpinan TNI dan Kementerian /Lembaga, yang wajib dilaksanakan karena merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI. Pimpinan TNI mengatakan bahwa MoU yang dilakukan merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada pasal 7 tugas pokok Tentara Nasional Indonesia dinyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) bahwa Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara

Ayat (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Operasi militer untuk perang dan Operasi militer selain perang,

Prajurit Marinir pada hakekatnya merupakan prajurit lapangan yang disiapkan, dididik, dilatih dan ditingkatkan kemampuannya untuk menghadapi situasi pertempuran, meskipun banyak ahli mengatakan bahwa kemungkinan terjadi perang konvensional antar negara yang satu dengan negara lain atau banyak negara yang terlibat, sangatlah kecil kemungkinannya terjadi. Mereka berpandangan bahwa anggaran biaya yang dikeluarkan dalam perang atau untuk mengivasi negara lain tidak

sebanding dengan keuntungan yang dicapai, bahkan kalau perhitungannya tidak cermat bisa menghancurkan dan atau bahkan membuat bangkrut ekonomi suatu negara, tetapi hal ini bukan berarti TNI tidak menyiapkan dan mensiagakan unsur-unsurnya, demikian juga prajurit Brigif 2 Marinir disaat damai seperti sekarang ini bukan berarti pasif dan tidak ada yang dilakukan, tetapi justru harus menempa diri supaya lebih profesional dengan cara mengasah naluri tempurnya sebagai seorang prajurit, bagi prajurit masa damai merupakan masa persiapan untuk perang, maka tidak ada jalan lain kecuali memprofesionalkan diri melalui latihan-latihan, supaya menjadi prajurit yang bisa diandalkan untuk menjaga kedaulatan dan wilayah negara kesatuan republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa Indonesia.

Hal tersebut diatas sesuai seperti yang dikatakan oleh *Sun Tzu*. bahwa Panglima yang akan memenangkan peperangan merupakan panglima yang tekun menyusun dan menyiapkan siasat perangnya dengan cermat, artinya harus ada latihan terus menerus baik latihan yang sifatnya bertingkat dan berlanjut atau latihan yang tidak bertingkat dan berlanjut disemua strata kepangkatan. Kesiapsiagaan dalam rangka menyiapkan operasi militer perang mutlak harus dilakukan, meskipun disisi lain bahwa prajurit juga dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dibidang penugasan operasi militer selain perang, tentunya hal ini akan sedikit menurunkan profesionalisme karena berkurangnya waktu untuk melatih diri bagi prajurit yang melaksanakan tugas tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Samuel P. Huntington dalam bukunya "*The Soldier and the State*" (1957 hal 84) bahwa yang paling utama dalam supremasi sipil atau sistem kontrol sipil adalah meminimalkan kekuatan militer secara obyektif dengan memprofesionalkan militer, dengan membuat mereka bersih dan netral dari unsur politik. Hal ini berarti bahwa untuk menuju profesional, dalam arti mempunyai kesiapsiagaan dan kesiapan menghadapi agresi militer negara lain, prajurit brigif 2 marinir harus fokus melatih diri dan melakukan kesiapan untuk melaksanakan tugas tersebut, tanpa disibukkan dengan tugas-tugas lain yang sifatnya

tugas perbantuan yang tidak ada hubungannya dengan profesionalisme militer.

Setiap prajurit marinir wajib memiliki 5 (lima) kemampuan pokok perorangan yang senantiasa dilatih baik secara mandiri maupun kelompok, latihan ini tidak hanya dilakukan oleh prajurit Infanteri saja tetapi juga prajurit Kavaleri, Arhanud maupun Bantuan Tempur. Kemampuan prajurit dalam menembak, berenang, melakukan *cross country*, halang rintang dan jurit marinir, mencerminkan bagaimana kesiapan dan kesemaptannya dalam mengemban tugas-tugas yang akan dihadapi, baik tugas di masa damai maupun pada masa perang. Seorang prajurit dituntut mempunyai nilai kemampuan tersebut dengan nilai minimal dan atau sama dengan 71 (tujuh puluh satu), namun karena beberapa penugasan OMSP yang harus dilaksanakan, menyebabkan prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigif 2 Marinir yang melaksanakan kegiatan OMSP tidak mempunyai waktu untuk berlatih secara intensif baik perorangan maupun satuan secara lengkap, sehingga hasil nilai UNPD tidak sesuai yang diharapkan (lihat tabel 4.5)

Program yang telah ditentukan untuk melaksanakan latihan tempur mulai dari tingkat M1 sampai dengan M4, tidak semua bisa dilaksanakan dengan baik, hal ini mengakibatkan siap tempur penuh-1 (ST-1), dimana suatu kondisi satuan yang mampu melaksanakan tugas sesuai fungsi utamanya atau tugas pokok yang diembannya meliputi kemampuan personil, terdukungnya material dan pelaksanaan latihan yang terprogram, tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. ST-1 dikatakan siap apabila 3 (tiga) unsur atau bidang kesiapan tempur masing-masing yang dipersyaratkan lebih besar atau sama dengan 95 %. Penugasan OMSP menjadikan prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigif 2 Marinir hanya mampu melaksanakan siap tempur sebagian atau siap tempur 2 (ST-2), artinya suatu kondisi satuan yang mampu melaksanakan semua fungsi utama/tugas pokoknya, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, karena 3 (tiga) unsur/ bidang kesiapan tempur

yang meliputi personel, material pendukung dan pelaksanaan latihan dipenuhi masing-masing lebih besar atau sama dengan 80 %.

Tabel 4.5 Prosentase Nilai Uji Nilai Perorangan Dasar (UNPD)

NO.	MENEMBAK		RENANG		CC		HR		JURIT MARINIR	
	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
1.	41-45		41-45		41-45		41-45		41-45	
2.	46-50		46-50		46-50		46-50		46-50	
3.	51-55		51-55		51-55		51-55		51-55	
4.	56-60		56-60		56-60		56-60		56-60	
5.	61-65	0.65	61-65		61-65		61-65	10.22	61-65	
6.	66-70	2.63	66-70		66-70	21.30	66-70	29.35	66-70	5.21
7.	71-75	7.83	71-75	35.65	71-75	25.87	71-75	27.82	71-75	7.82
8.	76-80	53.26	76-80	4.13	76-80	20.86	76-80	24.11	76-80	60.65
9.	81-85	23.04	81-85	55.43	81-85	9.35	81-85	1.74	81-85	21.74
10.	86-90	6.73	86-90	3.04	86-90	10.65	86-90	4.12	86-90	4.15
11.	91-95	5.86	91-95	1.09	91-95	11.74	91-95	3.47	91-95	0.43
12.	96-100		96-100		96-100		96-100		96-100	

Sumber : Hasil UNPD Staf Operasi Brigif 2 Marinir Tw 1 2017

Hasil tersebut diatas selalu dilaksanakan evaluasi setiap tahunnya, supaya pimpinan satuan atas mengetahui sejauh mana kesiapan prajuritnya, baik sebelum, proses pelaksanaan dan sesudah dilaksanakannya UNPD, seperti teori evaluasi Stake, bahwa suatu evaluasi formal harus memberikan perhatian pada keadaan sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, ketika proses implementasi, dan menghubungkannya dengan pencapaian hasil. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi yang mempunyai nilai merah, semua dalam melaksanakan UNPD kemampuan perorangan prajurit minimal harus diatas 71 (tujuh puluh satu).

Penugasan OMSP yang dilaksanakan oleh prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigif 2 Marinir Brigif 2 Marinir pada masa seperti sekarang ini,

selalu membawa dampak yang tidak bisa dihindari dan persepsi masing-masing orang berbeda-beda dalam menilai penugasan yang diembannya, sebagian mengatakan bahwa penugasan yang dilakukan seperti contoh diatas yaitu penugasan yang telah mendapatkan legalitas melalui MoU antar pimpinan TNI dan Kementerian/Lembaga tersebut sangat positif, tetapi juga ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa penugasan-penugasan OMSP yang dilakukan oleh TNI pada umumnya dan prajurit Brigif 2 Marinir pada khususnya, justru merupakan bentuk dari intervensi militer kepada masyarakat sipil dan dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Otto Soemarwoto bahwa dampak adalah pengaruh suatu kegiatan, artinya kegiatan yang dilakukan tersebut, bisa dipandang membawa pengaruh positif dan juga pengaruh sebaliknya atau negatif. Dampak dari penugasan non tempur dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kesejahteraan

Apapun teknologi persenjataan militer yang digunakan, pada akhirnya siapa yang memegangnya tetap saja menjadi faktor sangat penting. Demikian juga dengan pembangunan postur militer saat ini dan masa-masa mendatang. Pada akhirnya prajuritlah yang memiliki peranan besar dalam setiap upaya mempertahankan wilayah nusantara, melakukan pertahanan dan memenangkan pertempuran. Pada titik ini aspek kesejahteraan prajurit tidak boleh diabaikan. Connie R.B (2007, h 116) Dilihat dari asas keadilan, sistem penggajian di Indonesia kurang membangkitkan kompetisi dalam mencapai prestasi terbaik. Gaji didasarkan kepangkatan dan golongan seseorang, bukan hasil kinerja setiap hari, bulan dan setiap tahun. Sistem penggajian seperti sekarang tidak membangkitkan nilai efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi. Upaya para pihak untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja belum nampak. Bagi mereka yang mempunyai kepangkatan atau golongan yang sama, satunya bekerja malas-malasan, sementara yang lain bekerja sangat keras,

hasil yang diberikan sama dalam sistim insentifnya, sehingga hal ini tidak menimbulkan semangat untuk bekerja lebih giat. Disamping itu, sistem penggajianya juga kurang responsif terhadap kompleksitas pekerjaan seseorang. Orang yang bekerja di jabatan tertentu dengan bahaya dan risiko tinggi, kurang dihargai dalam penggajian sesuai dengan bebannya.

Kesejahteraan selalu berkaitan dengan besarnya gaji, tetapi dalam prakteknya, ada jaminan hari tua (pensiun), tunjangan anak dan isteri, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan berbagai kemudahan seperti mendapatkan kredit, tetapi apa yang didapatkan merupakan kebijakan yang sifatnya "*top down*" artinya penentuan besaran gaji tidak melibatkan unsur pekerja, akibatnya banyak keluhan tentang jaminan kesejahteraan dan gaji pekerja, karena yang didapatkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, apalagi dikaitkan dengan biaya kemahalan daerah seperti DKI Jakarta. Yeremias T. Keban (2004).

Tambahan kesejahteraan bagi prajurit yang melaksanakan penugasan OMSP merupakan anugerah tersendiri, karena seperti kesejahteraan yang diterangkan diatas, bahwa gaji prajurit yang hidup di kota besar seperti Jakarta, umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer hidupnya, tingkat kemahalan daerahnya jauh lebih tinggi dari pada di daerah-daerah lain yang lebih kecil, sehingga bila tidak disikapi dengan benar, kesejahteraan yang didapatkan dari melaksanakan penugasan OMSP bisa membuat lupa diri, kadang juga menjadikan prajurit lupa akan jati dirinya sebagai tentara profesional, yang dituntut kesiapannya untuk melaksanakan OMP sewaktu-waktu. Hal seperti ini harus menjadi perhatian pembuat kebijakan tentang besarnya gaji seorang prajurit, supaya mereka fokus mengabdikan kepada negara dan bangsa dalam menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah dan menjaga keselamatan bangsa dari setiap ancaman yang bakal timbul, meskipun waktunya tidak dapat diprediksikan

dan kemungkinannya sangat kecil, tetapi kesiapan prajurit mutlak diperlukan.

b. Kerjasama

Menurut Tenner dan Detoro (1992:183) *Team works is a group of individuals working together to reach a common goal.* Kerjasama tim adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dan mencapai tujuannya menjadi lebih mudah didapatkan dengan melakukan kerjasama daripada sendirian, sementara Tim terdiri dari sebuah kelompok yang anggotanya minimal memiliki satu tujuan, sedangkan faktor perlunya pembentukan tim tertentu tersebut adalah:

- 1). Apa yang dipikirkan oleh banyak orang jauh lebih baik daripada pemikiran satu orang.
- 2). Kolaborasi dari beberapa orang jauh lebih baik daripada anggota individual.
- 3). Kebersamaan antar anggota sangat penting karena bisa saling mengenal dan mempercayai serta bisa saling membantu.
- 4). Komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk membangun kerjasama tim, organisasi sulit terlaksana jika anggota tidak mau saling bekerja sama dan komunikasi secara terbuka, (Anthony, 1984 h 40-41).

Tuntutan profesionalisme salah satunya adalah kemampuan bekerjasama dengan orang yang baru kita kenal. Situasi seperti ini menjadikan kesempatan untuk belajar dan memahami bagaimana kehidupan diluar dirinya serta menambah pengalaman baru, terutama apabila menghadapi penugasan yang cukup kompleks dan luas areanya. Kemampuan menyesuaikan dengan situasi yang berbeda dengan sebelumnya, sangat mendukung keberhasilan *teamwork*, karena bisa saja dalam tim yang baru, seseorang yang mempunyai keahlian dapat melengkapi kekurangan orang lain yang ada dalam tim tersebut dan juga bisa sebaliknya, semuanya saling

melengkapi dan mendukung serta tidak mungkin dapat mencapai hasil yang optimal, apabila dikerjakan oleh individu per individu. Hubungan yang kooperatif perlu dilakukan, apalagi bila menghadapi suatu masalah yang harus dipecahkan bersama. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, apabila ingin sukses melakukan kerjasama membangun tim dengan teman baru, yang kebetulan harus melaksanakan tugas secara bersama-sama, yaitu

1). Ketepatan Waktu

Memulai kerjasama dengan personil yang baru bisa dikatakan “gampang-gampang susah”, oleh karenanya perlu merencanakan terlebih dahulu tentang apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir penugasan, supaya semua memahami *Standard Operating Procedure* (SOP) yang disepakati, sehingga mengetahui apa yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilakukan selama bekerjasama. Termasuk pembagian tugas masing-masing, sebelum dijadikan satu menjadi tugas bersama harus jelas, transparan, tepat waktu dan bisa diterima semua pihak yang terlibat di dalamnya dengan tetap menciptakan suasana yang saling menghargai dan kondusif.

2). Keterbukaan

Komunikasi memegang peran penting dalam kerjasama, apalagi bila dilakukan dengan orang yang baru dikenal. Perbedaan cara menyampaikan pendapat dan bekerja, kalau bisa dikompromikan terlebih dulu, supaya ada kenyamanan dan keterbukaan, yang akhirnya tercipta pemahaman dan pengertian diantara rekan-rekan yang terlibat kerjasama.

3). Saling mendukung

Kerjasama dalam situasi dan kondisi yang sebelumnya kurang dipahami tidaklah mudah, apalagi belum mahir terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, oleh karenanya jangan segan dan malu untuk bertanya kepada seseorang yang sudah lama dan berkecimpung dipekerjaan itu. Begitu pula

sebaliknya apabila ada yang kurang memahami sesuatu hal, hendaknya mau membantu pekerjaan orang lain yang belum terlalu menguasainya. Hal seperti ini sangat diperlukan dalam mendukung tercapainya tugas pokok.

4). Kebersamaan

Menghadapi situasi kerja dengan orang yang belum lama dikenal menuntut kehati-hatian, agar tidak ada ketersinggungan, disinilah perlunya melakukan kegiatan bersama diluar rutinitas kerja yang membutuhkan konsentrasi. Hal yang perlu dilakukan mungkin seperti makan dan minum di luar secara bersama-sama, tujuannya adalah memecah kebekuan yang ada dan kebersamaan sebelum menghadapi perkerjaan besar supaya “nyambung” saat bekerja bersama.

Kerjasama yang dilakukan oleh prajurit Korps Marinir dengan institusi lain dalam melaksanakan penugasan OMSP, dapat berjalan sangat baik sesuai dengan harapan yang dikehendaki pimpinan masing-masing. Kedua belah pihak dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan SOP yang telah ditentukan, sehingga tugas pokok yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini juga karena adanya keterbukaan dan saling mendukung keduanya, tugas seberat apapun apabila dihadapi dengan penuh semangat dan kekompakkan akan mudah untuk dikerjakan. Perlunya kerjasama dan kordinasi serta Interoperability antar instansi (TNI, Polri dan lembaga-lembaga lainnya) mutlak harus dilakukan, supaya tidak mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas.

c. Naluri Tempur

Penugasan OMSP yang dilakukan oleh prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigif 2 Marinir, menyebabkan tidak adanya waktu untuk melaksanakan kegiatan latihan, yang berakibat menurunnya naluri tempur prajurit yang bersangkutan, hal ini tidak boleh dibiarkan

tetapi harus dilatih secara intensif setelah melaksanakan tugasnya. Pembinaan latihan prajurit merupakan suatu sistem pembinaan yang terpadu antara kesiapan personil, kesiapan material dan perangkat lunak yang dirangkai dalam siklus kegiatan latihan dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran dengan penggolongan latihannya sebagai berikut :

1). Latihan Bertingkat dan Berlanjut.

Adalah latihan bagi prajurit dan satuan agar memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang standar. Diselenggarakan secara bertingkat dan berlanjut dimulai dari tingkat latihan perorangan dasar secara teknis sampai dengan latihan satuan antar angkatan secara taktis. Latihan bertingkat dan berlanjut dilaksanakan secara bertahap dimulai dari latihan tingkat M-1 sampai dengan latihan tingkat M-4, maksudnya adalah :

a) Latihan Tingkat M-1.

Latihan tingkat M-1 merupakan latihan pembinaan kemampuan pengetahuan dan keterampilan perorangan bagi setiap prajurit Korps Marinir yang terprogram sepanjang tahun anggaran sampai dengan satuan kecil sesuai jenis kesenjataan atau fungsi penugasannya.

b) Latihan Tingkat M-2.

Latihan tingkat M-2 merupakan latihan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan teknis satuan sampai dengan tingkat kompi/ baterai sesuai jenis kesenjataan Kormar.

c) Latihan Tingkat M-3.

Latihan tingkat M-3 merupakan latihan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis satuan sampai dengan tingkat batalyon/ satlak jajaran Kormar dan latihan pasukan pendarat setingkat batalyon.

d) Latihan Tingkat M-4.

Latihan tingkat M-4 merupakan latihan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis satuan sampai dengan tingkat resimen /brigade /kolak jajaran Kormar dan latihan Pasrat setingkat brigade.

2). Latihan Tidak Bertingkat dan Berlanjut.

Merupakan latihan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan yang telah dicapai atau untuk memperoleh keahlian di suatu bidang tertentu yang diperlukan dalam rangka pembinaan unsur/satuan jajaran Kormar. Latihan tersebut meliputi latihan dalam rangka peningkatan/ pemantapan kemampuan jabatan dan latihan dalam rangka peningkatan/pemantapan kesiapan satuan.

Hal tersebut diatas dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan maupun ketrampilan personil, baik perorangan ataupun kesatuan, supaya mencapai tingkat kesiapan operasional, yang dipersyaratkan dalam rangka memenuhi tuntutan tugas pokok atau tugas-tugas yang dibebankan kepada prajurit Brigif 2 Marinir. Sebagai pasukan pendarat seorang prajurit dilatih untuk peningkatan ketrampilan dan naluri tempurnya melalui paradigma operasi yaitu proyeksi dari laut ke darat, artinya penentuan materi latihan secara rinci diawali dengan melaksanakan latihan yang bernuansa laut dan rawa, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan latihan darat, gunung/hutan dan penguasaan pengetahuan tehnik dan prosedur operasi amfibi sesuai dengan fungsi dan jabatannya.

d. Pengalaman

Penugasan OMSP bagi prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigif 2 Marinir Brigif 2 Marinir, dapat dikatakan memberikan tambahan pengalaman baru, karena selama ini mereka jarang melaksanakan penugasan yang bersinggungan dengan masyarakat banyak, seperti penugasan di Bandara dan Kereta api, hal ini menjadi salah

satu motivasi bagi seorang prajurit dalam melaksanakan tugas tersebut. Kekuatan motivasi seseorang berbeda-beda, hal ini bisa tercermin dari upayanya dalam melaksanakan pekerjaan, mereka dapat melakukan dengan sangat giat atau cenderung malas. Ada dua hal yang harus dipenuhi seseorang, supaya bisa menghasilkan kinerja yang baik, yaitu :

Pertama, seseorang harus memiliki kemampuan untuk menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya, kemampuan ini bisa diperoleh melalui pendidikan ataupun pengalaman hidup yang bersangkutan. Tanpa kemampuan tidak mungkin dapat menghasilkan kinerja yang baik.

Kedua, persepsi yang dimiliki seseorang entah negatif atau positif atas pekerjaan yang dilakukan, dapat menyebabkan hasil yang dicapai juga bisa positif dan negatif, tergantung dari cara pandangnya.

Pengalaman yang diperoleh saat melaksanakan penugasan OMSP, seharusnya menjadi pemicu semangat dirinya ataupun prajurit yang lain, untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas apapun dikemudian hari, terutama dalam melaksanakan penugasan OMP, bukan justru sebaliknya menghambat kegiatan yang dilakukan satuannya dalam rangka peningkatan profesionalisme prajurit.

e. *Skill*

Kemampuan bertempur yang dimiliki seorang prajurit, harus selalu diasah melalui latihan secara bertingkat dan berlanjut, supaya semakin hari semakin tajam dan siap untuk digunakan untuk mengamankan bangsa dan negara, karena penguasaan ketrampilan militer merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam menghadapi ancaman dan gangguan yang menggunakan kekuatan bersenjata, baik yang dilakukan oleh *state actor* maupun *nonstate actor* yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan

wilayah, dan keselamatan bangsa. Penugasan OMSP tidak boleh menurunkan kualitas kemampuan bertempur seorang prajurit, meskipun kenyataannya sulit untuk dihindari, karena kekurangan waktu melaksanakan latihan.

OMSP juga merupakan Operasi Preventif. Dalam operasi ini kegiatan yang dilakukan seperti menyiapkan operasi intelijen dari satuan Yonif 2 dan Yonif 6 Brigif 2 Marinir di daerah-daerah rawan konflik seperti Aceh, Poso, Kalimantan dan Papua di bawah kendali BAIS TNI guna memantau perkembangan situasi keamanan nasional dan deteksi dini terhadap aksi-aksi radikal, serta bekerja sama dengan satuan Intelijen lainnya dalam rangka menjaga kewibawaan pemerintah Republik Indonesia. OMSP juga merupakan operasi sasaran terpilih melalui pelaksanaan tugas pengamanan VIP, VVIP dan Objek Vital, termasuk juga operasi penanggulangan bencana tergabung dalam satuan tugas Satuan Reaksi Cepat penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI, dalam rangka mengantisipasi tugas-tugas penanggulangan bencana alam secara cepat di seluruh NKRI, termasuk tugas pertolongan/SAR, serta operasi internasional di bawah PBB melalui penyiapan kekuatan satuan untuk diproyeksikan dalam operasi pemeliharaan perdamaian

Dengan demikian dapat disintesis bahwa dampak penugasan OMSP yang dilaksanakan oleh prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigif 2 Marinir berpengaruh terhadap profesionalisme yang bersangkutan, karena memang untuk sementara hanya dipersiapkan melaksanakan tugas OMSP. Seorang prajurit sudah seharusnya mempunyai kesemaptan dan *skill* militer yang mumpuni, sebagai wujud kesiapsiagaan dalam menghadapi tugas tugas tempur dimasa datang, meskipun hal itu kemungkinan terjadinya sangat kecil, tetapi bukan berarti prajurit melalaikan latihan-latihan yang mengarah terhadap kesiapan tersebut.

4.3.2 Kesiapan Operasi Militer untuk Perang Prajurit Yonif 4 Brigade Infanteri 2 Marinir

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demokrasi seperti Indonesia, tugas dan fungsi militer adalah dipersiapkan untuk perang. Militer direkrut, dididik, dilatih, dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain. Dengan fungsi dan tujuan untuk menghadapi ancaman perang, maka menyiapkan kapasitas dan kapabilitas militer yang kuat dan modern menjadi keharusan dalam kerangka menjaga kedaulatan negara dari kemungkinan adanya ancaman perang dari negara lain. Dengan demikian, pada masa damai seperti sekarang ini, militer perlu dipersiapkan kemampuannya secara profesional dengan latihan dan latihan. Di sisi lain, untuk menopang profesionalismenya, negara wajib menjamin dan memenuhi kesejahteraan prajurit sehingga fokus dan kerja prajurit benar-benar untuk menjalankan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara.

Pertahanan yang dilakukan oleh negara kesatuan republik Indonesia, diselenggarakan melalui usaha-usaha untuk membangun dan membina kekuatan pertahanan negara yang menghasilkan daya tangkal bangsa serta kemampuan dalam mengatasi dan menanggulangi setiap ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pertahanan negara republik Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh potensi dan segenap sumber daya nasional yang ada dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara terpadu. Pada situasi perang dimana negara menghadapi ancaman nyata, pemerintah mendayagunakan sistem pertahanan yang sesuai dengan ancaman atau tantangan yang ada. Sistem pertahanan negara republik Indonesia harus kuat dan untuk menjadi kuat di dalam menghadapi ancaman kekuatan militer negara lain, tidak ada cara lain kecuali dengan memadukan pertahanan militer dan nirmiliter dalam susunannya yaitu TNI sebagai komponen

utama dan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional sebagai komponen cadangan serta komponen pendukung. Sementara pada masa damai seperti sekarang ini, sistem pertahanan negara semesta dibangun untuk menghasilkan daya tangkal yang kokoh dengan menutup setiap celah kelemahan. Untuk mewujudkan tersebut diatas setiap komponen yang ada dituntut untuk mempersiapkan diri sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Pembinaan latihan dalam rangka kesiapan OMP yang dilakukan prajurit Yonif 4 Brigif 2 Marinir, merupakan suatu sistem pembinaan yang terpadu antara kesiapan personil, kesiapan material dan perangkat lunak yang dirangkai dalam siklus kegiatan latihan yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran secara bertingkat dan berlanjut, tidak bertingkat dan berlanjut, bertingkat dan tidak berlanjut maupun tidak bertingkat dan tidak berlanjut. Penyelenggaraan latihan ini berguna untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi, kemampuan, maupun ketrampilan personil, baik perorangan ataupun kesatuan, untuk mencapai tingkat kesiapan operasional yang dipersyaratkan dalam rangka memenuhi tuntutan tugas pokok dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada prajurit Yonif 4 Brigif 2 Marinir.

Mc.Clelland dalam dalam Moehariono, (2010, h 6), menjelaskan bahwa kompetensi adalah Karakteristik personel yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada suatu situasi tertentu, artinya sukses tidaknya pelaksanaan tugas pokok yang diemban oleh prajurit dalam suatu kelompok, tergantung dari individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut, kemampuan personil individu mempengaruhi ketangguhan dan kekompakkan kelompok dalam melaksanakan misinya. Prajurit dituntut untuk disiplin melaksanakan aturan yang berlaku, supaya apa yang menjadi tujuan kelompoknya dapat tercapai, hal ini juga sesuai seperti yang dikatakan Avin Fadila Helmi (1996) bahwa disiplin merupakan suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan

organisasi. Latihan-latihan yang telah dan sedang dilakukan oleh prajurit Yonif 4 Brigif 2 Marinir yang berhasil peneliti kumpulkan mulai tahun 2015-2017 dari staf operasi Brigif 2 Marinir adalah sebagai berikut :

a TA. 2015, meliputi:

- 1) TMT. 09 Maret s.d 31 Maret 2015, kuat 3 personel dipimpin Mayor Mar Hafied Indrawan NRP 15035/P Mendukung Latihan Kasus Denjaka, di Cilandak, Plaju Palembang.
- 2) TMT. 01 s.d 15 Juni 2015, Latihan M3 atau Latihan LSL-I Da/La, kuat 308 personel dipimpin Letkol Mar Bob O. Siregar NRP 13390/P di Rahlat Purwakarta Jawa Barat.
- 3) TMT. 03 s.d 13 Juni 2015, Latihan M1 Lattap Rupanpur, kuat 42 personel dipimpin Serda Mar Andri Saputra NRP 118505 di Rahlat Puslatpur Purboyo Jawa Timur.
- 4) TMT. 27 Juli s.d 25 Agustus 2015, Latihan Pratugas Satgas Force Protection Company (FPC), kuat 2 personel dipimpin Lettu Mar Ikvan Aryono NRP 19285/P di Rahlat PMPP TNI Sentul Bogor.
- 5) TMT. 27 Juli 2015, Latihan M2/ Latihan KSIT dan Bunis, kuat 31 personel dipimpin Lettu Mar Afdhal Siregar NRP 20018/P di Rahlat Marunda Jakarta Utara.
- 6) TMT. 27 Juli s.d 25 Agustus 2015, Latihan Pratugas TNI Konga XXIII-J/*Unifil*, kuat 16 personel dipimpin Kapten Mar Khaerul Bhakti NRP 18506/P di Rahlat PMPP TNI Sentul Bogor.
- 7) TMT. 28 Agustus s.d 18 September 2015, Latihan Bersama Silent Iron-15, kuat 1 personel a.n Kapten Mar Helilintar NRP 18291/P di Tanjung Priok Jakut.
- 8) TMT. 09 Oktober s.d 07 Nopember 2015, Latihan Pratugas Satgas Yonkomposit TNI Konga XXXV-B/Unamid Darfur, kuat 7 personel dipimpin Kapten Mar Jarot Witono NRP 18291/P di PMPP TNI Sentul Bogor.
- 9) TMT. 20 Nopember s.d 13 Desember 2015, Latihan Pemantapan Satuan Tempur Kormar , kuat 628 personel dipimpin Kolonel Mar Ali Bahar Saragih, SE NRP 10422/P di Rahlat Marunda, Muara

Gembong dan P. Damar.

- 10) TMT.17 s.d 23 Nopember 2015, Latihan M2/ Latihan Bunis & KSIT, kuat 32 personel dipimpin Lettu Mar Ikvan Aryono NRP 19285/P di Hambalang, Sentul Bogor.
 - 11) TMT. 23 Nopember s.d 25 Desember 2015, Latihan Pratugas Satgas KIZI TNI Konga XX-M/*Monusco* Kongo, kuat 2 personel dipimpin Serda Mar Joko P NRP 86198 di PMPP TNI Sentul Bogor.
- b. TA. 2016, meliputi:
- 1) TMT. 10 s.d 20 Januari 2016, Latihan Pratugas Denpursus Tinombala I, kuat 20 personel dipimpin Letkol Mar Samson Sitohang NRP 13924/P, di Labuan Banten Jawa Barat.
 - 2) TMT. 25 s.d 27 Januari 2016, Latihan LPD Triwulan I TA.2016, kuat 411 personel dipimpin Letkol Mar Ena Sulaksana NRP 13384/P, di Pantai Marina Ancol.
 - 3) TMT. 03 s.d 06 Februari 2016, Latihan M3/ Latihan Purkota & ODHB TA.2016, kuat 326 personel dipimpin Letkol Mar Ena Sulaksana NRP 13384/P, di Rahlat Karawang Jawa Barat.
 - 4) TMT. 03 s.d 06 Maret 2016, Latihan M3/ Latihan LSD-I Darat, kuat 144 personel dipimpin Letkol Mar Ena Sulaksana NRP 13384/P, di Rahlat Ciater Bandung Jawa Barat.
 - 5) TMT. 27 s.d 29 April 2016, Latihan M2/ Latihan Pemantapan Danton & Danki TA.2016, kuat 66 personel dipimpin Letkol Mar Isna Muhsin A. NRP 14446/P, di Rahlat Gn. Sanggabuana Jawa Barat.
 - 6) TMT. 10 s.d 12 Mei 2016, Latihan M1/ Pra Lattap Rupanpur, kuat 57 personel dipimpin Mayor Mar Dadang Widyanto NRP 17249/P, di Rahlat Gn. Hambalang Jawa Barat.
 - 7) TMT. 19 s.d 31 Mei 2016, Latihan M1/ Latihan Pembentukan Rupanpur TA.2016, kuat 42 personel dipimpin Serda Mar Sofi Yadi Khamim NRP 118514, di Rahlat Antralina Sukabumi Jawa Barat.
 - 8) TMT. 14 Mei s.d 06 Juni 2016, Latma GPOI Paece Keeping

Exercize Khaan Quest TA.2016, kuat 2 personel a.n Serka Mar M. Nuridin NRP 106752 & Pratu Mar Frengky Ganda P. NRP 117002, di Rahlat Ulaanbator, Mongolia.

- 9) TMT. 27 Juni s.d 10 Agustus 2016, Latma Multilateral Rimpac 2016, kuat 9 personel dipimpin Letda Mar Rony O. Sinaga NRP 21127/P, di Rahlat Hawaii, USA.
- 10) TMT. 18 s.d 29 Agustus 2016 Latihan M3/ Latihan Muara, Rawa, Sungai dan Pesisir Korps Marinir TA.2016, kuat 344 personel dipimpin Letkol Mar Ena Sulaksana NRP 13384/P, di Rahlat Muara Gembong Bekasi, Jawa Barat.
- 11) TMT. 22 Agustus s.d 23 September 2016, Latihan Pratugas Satgas KIZI TNI Konga XX-N/*Monusco* Kongo, kuat 2 personel dipimpin Sertu Mar Bowo Ari NRP 110242 di PMPP TNI Sentul Bogor.
- 12) TMT. 01 Nopember s.d 02 Desember 2016, Latihan Pratugas Satgas Yonkomposit TNI Konga XXX-C/*Unamid Darfur*, kuat 12 personel dipimpin Serda Mar Ranal Alfa Edison NRP 118491 di PMPP TNI Sentul Bogor.
- 13) TMT. 16 s.d 23 Desember 2016, Latihan M4/ Latihan Satuan Tempur Kormar TA.2016, kuat 950 pers dipimp Kol Mar Pardosi NRP 11460/P, di Rahlat Gn. Hambalang, Jawa Barat.

c. TA. 2017, meliputi:

- 1) TMT. 25 s.d 26 Januari 2017, Latihan M1/ Latihan Selam Rupanpur TA.2017, kuat 42 personel dipimpin Kapten Mar Kurnia Hendra W NRP 17746/P, di Rahlat P. Ancol.
- 2) TMT. 20 Maret s.d 03 April 2017, Latma GPOI Shanty Prayas III tahun 2017, kuat 3 personel dipimpin Mayor Mar Achmad Yulianto NRP 16125/P, di Nepal.
- 3) TMT. 07 s.d 16 April 2017, Latihan M2/ Lattap Danki 2017, kuat 2 personel dipimpin Kapten Mar Herwan Pratama NRP 19363/P di Rahlat PLP Baluran Malang.
- 4) TMT. 08 s.d 15 April 2017, Latihan M2/ Lattap Karu, Kasi Danton

2017, kuat 23 personel dipimpin Letda Mar Yitrem NRP 21156/P di Rahlat Antralina, Jawa Barat.

- 5) Latihan M4/ Perencanaan Latihan Pemantapan Terpadu Korps Marinir TA.2017.
- 6) Latihan M4/ Perencanaan dan persiapan PPRC TNI TA.2017.

Latihan-latihan tersebut diatas menunjukkan bahwa prajurit Yonif 4 Brigif 2 marinir tidak pernah lupa akan jati dirinya sebagai prajurit TNI yang harus berlatih dan berlatih mengasah ketrampilan militernya, karena hanya dengan cara seperti ini prajurit menjadi profesional dan siap mengamankan negara dan bangsa Indonesia.

Disaat damai seperti sekarang ini merupakan kesempatan bagi prajurit untuk melaksanakan latihan yang berorientasi pembangunan kemampuan dan kekuatan militer, supaya dapat menghadapi ancaman militer dan mempertahankan eksistensi NKRI. Ancaman militer yang datang dari negara lain merupakan ancaman yang dapat memporak-porandakan, menghancurkan dan menenyapkan keberadaan suatu bangsa dan negara. Ancaman militer dapat berbentuk agresi maupun bukan agresi. Ancaman militer berbentuk agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Banyak pakar mengatakan bahwa perang konvensional kemungkinannya kecil, hal ini dipertegas juga melalui piagam PBB, bahwa semua negara di dunia berkomitmen untuk saling menghargai, menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing, tetapi kekuatan militer suatu negara tidak boleh lemah dan lengah, apalagi negara yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah seperti Indonesia. Dinamika perkembangan lingkungan strategis sangat cepat, bisa saja ancaman belum nyata tiba-tiba berubah menjadi ancaman nyata yang melibatkan kekuatan militer, walaupun hal ini jarang terjadi karena perubahannya selalu didahului dengan tahapan-tahapan eskalasi. Hal ini sesuai teori Macchiavelli yang mengatakan bahwa perang dianggap sebagai jalan utama untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dan juga

perang merupakan suatu dasar yang alamiah dalam penyelesaian masalah serta penting untuk dilakukan. Jika suatu negara gagal dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik ataupun dalam mencapai

Menurut Syaiful Anwar (2016, h 326) bahwa sumber daya manusia militer perlu disiapkan secara profesional dan seksama, sehingga mencapai tingkat kemampuan atau kompetensi seperti yang sudah ditetapkan. Prajurit Yonif 4 Brigif 2 Marinir pada hakekatnya merupakan pasukan pendarat yaitu prajurit yang dibekali pengetahuan dan kemampuan tentang Operasi Amfibi serta setiap saat dapat digerakkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang melalui operasi amfibi. Operasi ini mengintegrasikan berbagai jenis kekuatan seperti kapal, pesawat udara dan pasukan pendarat dalam suatu serangan terhadap pantai musuh dan atau berpotensi dikuasai musuh serta bersifat kelautan, dalam arti bahwa TNI AL memegang peranan utama operasi tersebut. Tujuannya dilaksanakan operasi amfibi adalah untuk merebut suatu daerah dipantai musuh atau pantai yang berpotensi dikuasai musuh guna operasi tempur lain atau operasi tempur selanjutnya dan juga untuk mencegah suatu daerah atau fasilitas yang ada digunakan oleh musuh. Komando Pendidikan Marinir (2007)

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Brigif 2 Mar mempunyai tugas kewajiban mempersiapkan satuannya yang ditunjuk sebagai BTP sebagai berikut :

- a Membina kesiapsiagaan operasional dilaksanakan dengan mengoptimalkan latihan Operasi Amfibi mulai tingkat Batalyon Tim Pendarat (BTP)/ Yonif 4 Marinir sampai dengan Brigade Pendarat.
- b Menyiapkan kesiapan satuan untuk mendukung penugasan satuan-satuan Marinir yang akan melaksanakan operasi-operasi antara lain adalah sebagai berikut :
 - 1) Operasi Represif.

Dalam operasi ini Brigif 2 Mar menyiapkan kekuatan satuan Yonif 4 Marinir pada kondisi siaga operasional BTP yang tergabung

dalam satuan tugas laut Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, Operasi Trisila wilayah barat dan Operasi Gabungan TNI

2) Operasi Prioritas

Brigif 2 Mar dalam melaksanakan tugas operasi ini yaitu menyiapkan kekuatan satuan tugas untuk mengamankan pulau-pulau terluar Indonesia guna menjaga wilayah dan kedaulatan NKRI

Dengan demikian dapat disintesis bahwa pertahanan negara republik Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh potensi dan segenap sumber daya nasional yang ada dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara terpadu. Pada situasi perang dimana negara menghadapi ancaman nyata, pemerintah mendayagunakan sistem pertahanan yang sesuai dengan ancaman yang ada. Sistem pertahanan negara republik Indonesia harus kuat dan untuk menjadi kuat di dalam menghadapi ancaman kekuatan militer negara lain, tidak ada cara lain kecuali dengan berlatih dan berlatih, serta memadukan pertahanan militer dan nirmiliter dalam susunannya yaitu militer sebagai komponen utama dan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional sebagai komponen cadangan serta komponen pendukung. Kesiapan melaksanakan penugasan OMP oleh prajurit Yonif 4 Brigade Infanteri 2 Marinir menjadi prioritas dan dilaksanakan melalui latihan-latihan secara terprogram, baik latihan bertingkat dan berlanjut maupun latihan yang tidak bertingkat dan tidak berlanjut. Hal ini merupakan salah satu bentuk antisipasi, karena setiap saat ditugaskan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, khususnya yang datang dari negara lain yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara republik Indonesia.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh pada penelitian serta teori-teori yang dijadikan dasar pemikiran dalam tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penugasan Operasi Militer Selain Perang yang dilakukan oleh Prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigade Infanteri 2 Marinir, merupakan implementasi dari MoU antara pimpinan TNI dengan pimpinan kementerian/lembaga yang bersangkutan. Tugas perbantuan selama ini dapat dirangkum menjadi tugas penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (*humanitarian relief*), tugas kegiatan kemasyarakatan (*civic mission*), tugas pemberian bantuan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban umum, serta tugas pemeliharaan perdamaian dunia. Tugas pemberian bantuan kepada pemerintahan daerah dan kementerian/lembaga selama ini, dilakukan dalam bentuk tugas pengamanan, seperti pengamanan Bandara, pengamanan Kereta Api, pengamanan Pilkada, pengamanan Demonstrasi/Unjuk Rasa dan penugasan perbantuan lainnya.

Dampak penugasan OMSP yang dilaksanakan adalah Menurunnya *Skill* militer dan naluri tempur prajurit yang bersangkutan atau yang melaksanakan, karena penugasan OMSP yang dilakukan bersifat statis dan menyita banyak waktu, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan latihan ketrampilan 5 (lima) aspek kemampuan perorangan, dimana kemampuan tersebut harus dimiliki oleh setiap prajurit marinir, seperti latihan menembak, CC, HR, renang dan Hanmars, begitu juga kegiatan latihan tempur yang lain mulai dari tingkat M1 s/d M4, tidak bisa terlaksana secara maksimal. Hal ini mempengaruhi kesiapan tempurnya menjadi siap tempur 2 artinya suatu kondisi satuan yang mampu melaksanakan

tugas semua fungsi utama/tugas pokoknya, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Akibatnya kesiapan tempur yang meliputi personil, material dan latihan masing-masing tidak lebih besar atau sama dengan 80% dan termasuk kategori siap tempur sebagian (ST-2). Kegiatan latihan oleh prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigade Infanteri 2 Marinir secara keseluruhan, baru dapat dilaksanakan apabila penugasan OMSP telah selesai dilakukan.

2. Yonif 4 Brigade Infanteri 2 Marinir merupakan Batalyon Tim Pendarat yang dipersiapkan untuk melaksanakan penugasan OMP, profesionalismenya di bidang kemiliteran tidak diragukan lagi karena kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan adalah berlatih dan berlatih melaksanakan latihan pertempuran, serta sewaktu-waktu siap untuk digerakkan ke medan perang menghadapi kekuatan militer negara lain. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1) yang dikatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk menjaga kemampuan dan kesiapan prajurit tersebut, dilaksanakan kegiatan pembinaan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan petunjuk pembinaan dan latihan serta petunjuk materi latihan korps marinir yang didukung peralatan tempur modern dan lengkap, sehingga mampu menghadapi perkembangan dan dinamika strategis yang mengancam kedaulatan negara republik indonesia. Akibat dari seringnya melaksanakan latihan yang berorientasi latihan penugasan OMP menjadikan prajurit Yonif 4 Marinir siap tempur penuh (ST-1) yaitu suatu kondisi satuan yang mampu melaksanakan tugas sesuai fungsi utamanya atau tugas pokok

yang diembannya, karena 3 (tiga) unsur kesiapan tempur yang meliputi personil, material dan latihan dipenuhi masing-masing lebih besar atau sama dengan 95%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada Stakeholder. yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan OMSP bagi prajurit Yonif 2 dan Yonif 6 Brigif 2 Marinir, merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara melalui implementasi pelaksanaan perintah pimpinan TNI, dasarnya adalah MoU yang telah dibuat oleh Panglima TNI dengan pimpinan Kementerian/Lembaga selain Kementerian Pertahanan. Sementara untuk menghindari dampak negatif apabila ada permintaan yang terkait tugas perbantuan, maka prajurit yang melaksanakan penugasan OMSP, kedepannya diharapkan melaksanakan pergantian atau rotasi penugasan secara tetap yaitu tidak terlalu lama atau tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
2. Masa damai bagi seorang prajurit merupakan masa persiapan untuk melaksanakan suatu pertempuran atau melaksanakan tugas OMP, hal ini sesuai dengan tugas pokoknya selaku prajurit, seperti yang tercantum dalam UU NO 34/2004 tentang TNI. Satuan tempur BTP seperti prajurit Yonif 4 Brigif 2 Marinir disiapkan secara khusus dan fokus melaksanakan kegiatan latihan yang menunjang tugas pokoknya dalam melaksanakan OMP melalui operasi amfibi, tuntutan profesionalisme di bidang pertahanan mutlak, karena sewaktu-waktu melaksanakan tugas OMP menghadapi agresi atau ancaman militer yang datang dari negara lain, kedepannya batalyon yang disiapkan untuk melaksanakan penugasan OMP, agar dibebaskan dari tugas apapun yang tidak ada kaitannya dengan kesiapan melaksanakan operasi tempur, termasuk penugasan OMSP

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Ari G H, Kuntum C U, Sabar S : Peran Dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi Di Kabupaten Lebak, Universitas Padjdjaran Indonesia
- Artmanda, W. Frista. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Lintas Media Jombang
- Bungin, H.M. Burhan. (2011) :Penelitian Kualitatif,Kencana Prenada Media Group
- Britton, Peter. (1996) : Profisionalisme dan Ideologi Militer Indonesia, Perspektif Tradisi-tradisi Jawa dan Barat, LP3ES Indonesia
- Connie Rahakundini Bakrie.(2007) : Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Yayasan Obor Indonesia
- Creswel, W.Jhon, W. (2014) : Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Pustaka Pelajar
- Diandra M M : Problematika Tugas Perbantuan TNI, Pusat kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Effendy, Muhadjir. (2008) : Profesionalisme Militer : Profesionalisasi TNI, UMM
- Effendy, Muhadjir. (2013) : Jati Diri dan Profesionalisme TNI, UMM
- Echols, Jhon, M. dan Shadily, H. (1992) : Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Jakarta
- Fadila, Helmi, Avin. (1996) : Disiplin Kerja, Buletin Psikologi Tahun IV No 2 Desember 1996 Edisi Khusus Ulang Tahun XXXII, hal 35
- Kemhan RI (2015) : Buku Putih Pertahanan Indonesia
- Kemhan RI (2007) : Postur Pertahanan Negara
- Moleong, J. Lexy. (2016) : Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Bandung

- Rusdi, M. Al Araf, Ghufron, M. junaidi. (2005) : Menuju TNI Profesional tidak berbisnis dan tidak berpolitik (Perjalanan Advokasi RUU TNI), Imparsial, Koalisi Keselamatan Masyarakat Sipil, LSPP
- Syaiful Anwar (2016) : Melindungi Negara, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Syarifudin Tippe, (2012),: Human Capital Management model Pengembangan Organisasi Militer Indonesia, PT Elek Media Komputindo
- Supriyatno, Makmur. (2016) : Tentang Perang bagian 1 terjemahan dari buku “ On War” Carl Von Clausewitz, Makmur Cahaya Ilmu Jakarta
- Sayidiman Suryohadiprojo,(2010) : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif, Pustaka Intermedia
- Slameto. (2015) : Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhi, Rineka Cipta
- Samuel, P. Huntington. (1957) : The Soldier and The State “ The Theory and Politics of civil Military Relation” The Belknap Press of Harvard university press
- Sugiyono. (2014) : Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Alfabeta Bandung
- Suyanto, Djoko. (2007) : Menuju TNI Profesionalisme dan Dedikatif, Puspen TNI
- Kobangdikkal,(2007), Visvakosah Sekolah Perwira
- Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, (2008), Pertahan Semesta dan Wajib Militer
- Yeremias T. Keban (2004) Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen Sdm Pns Di Indonesia

ONLINE

- Otto Soemarwoto : Dampak Pengaruh Kegiatan <http://digilib.unila.ac.id/11476/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf> diakses 15 sept 2017 pk 18,30
- Sun Tzu :Teori Kepemimpinan <http://unmbem1213.blogspot.co.id/2013/07/teori-kepemimpinan-dari-sun-tzu.html> diakses 3 Mei 2017 pk 21.24
- Hughes, Glys. 2011. Squashed Philosophers Abridged Edition – Clausewitz–On War. [online]. Tersedia dalam: <http://www.btinternet.com/~glynhughes/squashed/clausewitz.htm>. Diakses pada 8 Agustus 2017 pk 15.00
- Dispen Mabes TNI : TNI-Sebagai-Tentara Profesional <http://www.tni.mil.id/view-2776-tni-sebagai-tentara-profesional.html> , diakses tgl 21 Mei 2017, pkl 19.05
- Machiavelli :Perang-Menurut-Prinsip-Machiavelli <https://www.seniberpikir.com/perang-menurut-prinsip-machiavelli/> diakses 22 Mei 2017 pk 12.55
- James Drever : Manfaat dan Tujuan Disiplin Pratt Fairshild ,<http://www.dosenpendidikan.com/disiplin-9-pengertian-menurut-para-ahli-macam-manfaat-tujuan/>, 15 sept 2017, pk 19.02
- Erghy Ghulam Habibie: Strategi Perang Clausewitz http://erggy-g-h-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-44585-Strategi%20dan%20Tata%20Kelola%20Strategis-Strategi%20dalam%20Kacamata%20Clausewitz.html diakses tgl 15 sept 2017, pk 15.40
- Lailah Fijianti: Profesionalisme http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/149911100514_2643097715March2015.pdf diakses tgl 15 sept 2017 pk 17.3
- Shafira Meutiah: Kerjasama <http://blog.jobs.id/8-tips-ampuh-kerjasama-tim-dengan-rekan-kerja-baru/>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI

Doktrin TNI tentang Operasi Amfibi, Skep Pang TNI Nomor
Kep/264/1V/2013 tanggal 05 April 2013

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/163/V/2003 tanggal 12 Mei 2003,
tentang Operasi Gabungan TNI tentang Operasi Amfibi

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/264/IV/2013 tanggal 5 April 2013,
tentang Doktrin Operasi Amfibi;



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor: B/ 1633 /M/2017
Klasifikasi: Biasa
Lampiran: -
Hal: Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 19 Juni 2017

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam
lampiran

di

Tempat

1. Dasar

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon dapatnya Bapak/Ibu pejabat berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort 8 Universitas Pertahanan TA. 2016/2017 atas nama Agus Sunardi NIM 120160101003 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Dampak Penugasan Nontempur Bagi Prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir Terhadap Kesiapan Operasi Militer Untuk Perang".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : asunardi20@gmail.com dan HP 081286420887.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

Rektor
Universitas Pertahanan,



Dr. I Wayan Midho, M.Phil
Letnan Jenderal TNI

Tembusan:

1. Warek I Unhan
2. Dekan FSP Unhan
3. Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : BI 1533 MI/2017
Tanggal : 19 Juni 2017

DAFTAR NAMA PEJABAT:

1. Komandan Korps Marinir
2. Kadisopslatl Mabesal
3. Asops Dankormar
4. Aspers Dankormar
5. Komandan Pasmar 2 Jakarta
6. Komandan Brigif 2 Marinir
7. Komandan Kolatmar Grati Pasuruan
8. Pasops Brigif 2 Marinir

Rektor
Universitas Pertahanan,



Dr. I Wayan Michyo, M.Phil.
Letnan Jenderal TNI

PANDUAN WAWANCARA

Interviewer : Komandan Korps Marinir
 Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Tempat : MakoKormar
 Kode Instrumen : 1 A
 Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit ?

1. Bagaimanakah latar belakang adanya kebijakan penugasan non tempur bagi prajurit ?
2. Kenapa dilaksanakan penugasan non tempur bagi prajurit ?
3. Bagaimanakah mempersiapkan penugasan non tempur bagi prajurit ?
4. Bagaimanakah konsep/ strategi pelaksanaan penugasan non tempur bagi prajurit ?
5. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ?
6. Bagaimanakah penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ?
7. Apa ada kebijakan khusus terkait dengan dampak penugasan non tempur bagi prajurit ?

B. Kesiapan operasi militer untuk perang ?

8. Bagaimanakah kesiapan personil dan material terhadap pelaksanaan operasi militer untuk perang ?

C. Apakah dampak penugasan non tempur mempengaruhi kesiapan operasi amfibi ?

9. Bagaimanakah mensinergikan dampak penugasan non tempur Prajurit terhadap kesiapan pelaksanaan operasi amfibi dalam mendukung OMP ?

PANDUAN WAWANCARA

Interviewer : Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI AL
 Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Tempat : Mabesal
 Kode Instrumen : 1 A
 Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit ?

1. Bagaimanakah latar belakang adanya kebijakan TNI AL dalam penugasan non tempur bagi Prajurit ?
2. Kenapa dilaksanakan penugasan non tempur bagi prajurit ?
3. Bagaimanakah konsep/ strategi pelaksanaan penugasan non tempur bagi Prajurit ?
4. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ?
5. Bagaimanakah penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi Prajurit ?
6. Apa ada kebijakan khusus terkait dengan dampak penugasan non tempur bagi Prajurit ?

B. Kesiapan operasi militer untuk perang?

7. Bagaimanakah pendapat atau pandangan laksamana terhadap kesiapan pelaksanaan operasi amfibi prajurit marinir dalam mendukung OMP ?

C. Apakah dampak penugasan non tempur mempengaruhi kesiapan operasi amfibi?

8. Bagaimanakah mensinergikan dampak penugasan non tempur Prajurit terhadap kesiapan operasi amfibi dalam mendukung OMP ?

PANDUAN WAWANCARA

Interviewer : Komandan Pasmar – 2 Korps Marinir
 Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Tempat : MakoPasmar 2
 Kode Instrumen : 1 A
 Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit

1. Bagaimanakah implementasi dari kebijakan Korps Marinir tentang penugasan non tempur bagi Prajurit ?
2. Bagaimanakah strategi pelaksanaan penugasan non tempur Prajurit supaya berhasil ?
3. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ?
4. Bagaimanakah penanganan dampak yang ditimbulkan akibat penugasan non tempur bagi Prajurit ?
5. Apa ada kebijakan khusus terkait dengan dampak penugasan non tempur bagi Prajurit ?

B. Kesiapan operasi militer untuk perang ?

6. Bagaimanakah kesiapan personil dan material terhadap pelaksanaan operasi militer untuk perang ?

C. Apakah dampak penugasan non tempur mempengaruhi kesiapan operasi amfibi ?

7. Bagaimanakah mensinergikan dampak penugasan non tempur Prajurit terhadap kesiapan operasi amfibi dalam mendukung OMP ?

PANDUAN WAWANCARA

Interviewer : Asops Komandan Korps Marinir
 Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Tempat : MakoKormar
 Kode Instrumen : 1 B
 Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit

1. Bagaimanakah mengimplementasikan kebijakan Korps Marinir tentang penugasan non tempur bagi Prajurit ?
2. Bagaimanakah konsep pelaksanaan penugasan non tempur bagi Prajurit supaya berhasil?
3. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ?
4. Bagaimanakah penanganan dampak yang ditimbulkan akibat penugasan non tempur bagi Prajurit ?
5. Apa ada kebijakan khusus terkait dengan dampak penugasan non tempur bagi Prajurit ?

B. Kesiapan operasi militer untuk perang ?

6. Bagaimanakah monitoring kesiapan personil dan material terhadap pelaksanaan operasi militer untuk perang?

C. Apakah dampak penugasan non tempur mempengaruhi kesiapan operasi amfibi?

7. Bagaimanakah mensinergikan dampak penugasan non tempur Prajurit terhadap kesiapan operasi amfibi dalam mendukung OMP ?

PANDUAN WAWANCARA

Interviewer : Aspers Komandan korps marinir
 Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Tempat : MakoKormar
 Kode Instrumen : 1 B
 Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit

1. Bagaimana mengimplementasikan kebijakan Korps Marinir tentang penugasan non tempur bagi Prajurit ?
2. Bagaimana konsep/ strategi pelaksanaan penugasan non tempur bagi Prajurit ?
3. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ?
4. Bagaimana penanganan dampak yang ditimbulkan akibat penugasan non tempur bagi Prajurit ?
5. Apa ada kebijakan khusus terkait dengan dampak penugasan non tempur bagi Prajurit ?

B. Kesiapan operasi militer untuk perang (OMP) ?

6.

Bagaimanakah kesiapan personil terhadap pelaksanaan operasi militer untuk perang?

C. Apakah dampak penugasan non tempur mempengaruhi kesiapan operasi amfibi?

7. Bagaimanakah mensinergikan dampak penugasan non tempur Prajurit terhadap kesiapan operasi amfibi dalam mendukung OMP ?

PANDUAN WAWANCARA

Interviewer : Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir
 Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Tempat : Mako Brigade Infanteri 2 Marinir
 Kode Instrumen : 1 C
 Pertanyaan :

A. Bagaimana Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit

1. Bagaimanakah mengimplementasikan kebijakan Pasmar 2 dalam penugasan non tempur Prajurit ?
2. Bagaimanakah mempersiapkan personil dan material terhadap penugasan non tempur bagi Prajurit ?
3. Bagaimanakah teknis pelaksanaan penugasan non tempur bagi Prajurit ?
4. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ?
5. Bagaimanakah penanganan dampak yang ditimbulkan akibat penugasan non tempur bagi Prajurit ?
6. Apakah ada kiat khusus terkait dengan penugasan non tempur bagi Prajurit ?

B. Kesiapan operasi militer untuk perang (OMP) ?

7. Bagaimanakah kesiapan personil dan material dalam pelaksanaan operasi militer untuk perang ?

C. Apakah dampak penugasan non tempur mempengaruhi kesiapan operasi amfibi ?

8. Bagaimanakah mensinergikan dampak penugasan non tempur Prajurit terhadap kesiapan operasi amfibi dalam mendukung OMP ?

PANDUAN WAWANCARA

Interviewer : Perwira Staf Operasi Brigade 2 Marinir
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat : Mako Brigade Infanteri 2 Marinir
Kode Instrumen : 1 C
Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit

1. Bagaimanakah mempersiapkan personil dan material terhadap penugasan non tempur bagi Prajurit ?
2. Bagaimanakah teknis pelaksanaan penugasan non tempur bagi Prajurit ?
3. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ?
4. Bagaimanakah penanganan dampak yang ditimbulkan akibat penugasan non tempur bagi Prajurit ?

B. Apakah dampak penugasan non tempur mempengaruhi kesiapan operasi amfibi?

5. Bagaimanakah mensinergikan dampak penugasan non tempur Prajurit terhadap kesiapan operasi amfibi dalam mendukung OMP ?

PANDUAN WAWANCARA

Interviewer : Komandan Komando Latihan Marinir
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat : Mako Kolatmar
Kode Instrumen : 1 B
Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit

Apakah ada dampak dari penugasan Non Tempur Prajurit Marinir seperti penugasan Pam Bandara, Kereta Api, tugas bantuan ke Pemda, Pam VIP dan lain-lain, terhadap kualitas latihan prajurit marinir ?

B. Kesiapan Operasi Militer untuk Perang (OMP) ?

Bagaimanakah pandangan Komandan tentang kesiapan Prajurit Marinir terhadap Operasi Militer Perang ?

C. Apakah dampak penugasan non tempur mempengaruhi kesiapan Operasi Amphibi ?

Bagaimanakah mensinergikan dampak penugasan non tempur Prajurit terhadap kesiapan Operasi Amphibi dalam mendukung Operasi Militer Perang ?

TRANSKRIP WAWANCARA

Interviewer : Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI AL
Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017
Waktu : 10,00 Wib
Tempat : Mabesal
Kode Instrumen : 1 A
Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit ?

1. Bagaimanakah latar belakang adanya kebijakan TNI AL dalam penugasan non tempur bagi Prajurit ? Penugasan non tempur merupakan kebijakan pimpinan TNI sebagai implementasi UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI
2. Kenapa dilaksanakan penugasan non tempur bagi prajurit ? Karena tugas TNI termasuk prajurit Brigif 2 Marinir adalah melaksanakan OMP dan OMSP sesuai amanat Undang-undang
3. Bagaimanakah konsep/ strategi pelaksanaan penugasan non tempur bagi Prajurit ? Prajurit yang ditugaskan harus melalui mekanisme seleksi internal, mereka terpilih dari yang ada
4. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ? Dampak yang ditimbulkan ada dua yaitu berdampak positif bila penugasan non tempur yang dilakukan prajurit membawa manfaat bagi masyarakat, termasuk juga bagi prajurit yang melaksanakannya dan sebaliknya juga bisa negatif karena apabila penugasannya terlalu lama berakibat menurunnya profesionalisme prajurit.
5. Bagaimanakah penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi Prajurit ? Penanganannya yaitu dengan mengurangi lamanya waktu penugasan atau menjadi tidak lebih dari 3 bulan, supaya satuan masih dapat membina naluri tempurnya melalui latihan-latihan.

terkontrol, maklum prajurit selama ini doktrinnya selalu *Kill or To Be Kill*, untuk menyesuaikan perlu waktu.

6. Bagaimanakah penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ? Apabila ditemukan dampak negatif yang kurang baik bagi dirinya, satuannya terlebih bagi masyarakat secara luas, prajurit tersebut langsung kita ganti dengan prajurit yang lain.
7. Apa ada kebijakan khusus terkait dengan dampak penugasan non tempur bagi prajurit ?Selalu kita ingatkan kepada prajurit, supaya pandai membawa diri dan mampu mengemban tugas non tempur dengan baik serta dekat dengan masyarakat, karena ini sebuah kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan.

B. Kesiapan operasi militer untuk perang ?

8. Bagaimanakah kesiapan personil dan material terhadap pelaksanaan operasi militer untuk perang ? Prajurit Korps Marinir merupakan prajurit lapangan, harus selalu siap mengemban tugas negara melalui kesiapan OMP, baik personilnya melalui latihan-latihan yang sudah diprogramkan, maupun materialnya yang setiap saat di *maintenance* dan mengupayakan pembelian material tempur baru sesuai kemampuan anggaran yang ada.

6. Apa ada kebijakan khusus terkait dengan dampak penugasan non tempur bagi Prajurit ? Tidak ada, semua penugasan harus dilaksanakan secara optimal.

B. Kesiapan operasi militer untuk perang ?

7. Bagaimanakah pendapat atau pandangan laksamana terhadap kesiapan pelaksanaan operasi amfibi prajurit marinir dalam mendukung OMP ? Pandangan saya terhadap kesiapan OMP masih bagus, dalam arti apa yang dilatihkan masih sesuai dengan doktrin operasi amfibi.



TRANSKRIP WAWANCARA

Interviewer : Komandan Pasmar 2 Korps Marinir
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2017
Waktu : 11.30 Wib
Tempat : Mako Pasmar 2
Kode Instrumen : 1 A
Pertanyaan :

1. Bagaimanakah implementasi dari kebijakan Korps Marinir tentang penugasan non tempur Prajurit?

- Korps Marinir sebagai salah satu Komando Utama TNI AL yang mengemban tugas pokok membina kekuatan dan kesiapan operasional satuan Korps Marinir sebagai pasukan pendarat amfibi dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut, operasi pertahanan pantai di pulau - pulau strategis serta operasi tempur lainnya sesuai kebijakan Panglima TNI, meliputi;

- a. Satgas Pam Pulau terluar
- b. Satgas Pam Huru-Hara
- c. Satgas Pam Pilkada
- d. Satgas Pemadaman Kebakaran Hutan
- e. Satgas Banjir
- f. Satgas SAR
- g. Satgas Pam di instansi Pemerintahan

Satgas Pam di instansi Pemerintahan merupakan permintaan langsung ke Korps Marinir, ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada TNI khususnya Marinir, seperti contoh Satgas Pam Obsvit Kemenhub yaitu di Bandara, KAI dan sebagainya untuk membantu instansi tersebut dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Bagaimanakah konsep/ strategi pelaksanaan penugasan non tempur Prajurit supaya berhasil?

Prajurit Korps Marinir selama ini senantiasa dilibatkan dalam menangani berbagai persoalan di daerah dan telah memberikan hasil yang positif dan maksimal serta mendapat respon positif dari masyarakat. Intensitas penugasan

yang demikian padat menimbulkan kelelahan secara psikologis dikalangan prajurit. Dibutuhkan ketersediaan kekuatan yang dicadangkan dan kekuatan yang dipersiapkan dengan masa rotasi penugasan kedaerah operasi yang ideal untuk Tugas Tempur: 6 s.d 9 bulan dan Tugas non-tempur : 9 s.d 12 bulan. Oleh karenanya diperlukan penambahan kekuatan yang secara signifikan agar sasaran tersebut dapat tercapai dan dalam melaksanakan tugas selalu melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Sebelum melaksanakan tugas non tempur komandan satuan akan mempelajari tugas yang diberikan dari komando atas.
- b. Melaksanakan kordinasi yang ketat dengan instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
- c. Mempelajari SOP (Standart operating Procedure) yang berlaku dan ROE (Role Of Engadgement) atau aturan pelibatan yang berkaitan dengan tugas yang diberikan.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang optimal selama melaksanakan penugasan.

3. Dampak apakah yg ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit?

Ada 2 dampak yang dapat ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit;

a. Dampak positif

- 1) Dapat memberikan kegiatan bagi prajurit selama masa damai. Dapat memberikan tambahan pengalaman bagi prajurit dalam melaksanakan OMSP.
- 2) Dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit.
- 3) Dapat meningkatkan kerjasama dan kordinasi serta interoperability antar instansi (TNI, Polri dan lembaga-lembaga lainnya).

b. Dampak negatif

- 1) Dapat mempengaruhi menurunnya naluri tempur prajurit, dihadapkan dengan medan operasi yang dihadapi saat latihan maupun penugasan.
- 2) Menurunnya skill tempur prajurit karena tidak bisa melaksanakan latihan rutin yang seharusnya prajurit itu laksanakan, seperti latihan menembak, renang, dan sebagainya, walaupun hal tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berlatih.

4. Bagaimanakah penanganan dampak yang ditimbulkan akibat penugasan non tempur bagi prajurit?

Dampak penugasan non tempur pasti ada tetapi tidak terlalu signifikan, karena penugasan non tempur merupakan salah satu tugas pokok prajurit TNI selain tugas tempur, penanganan dampak yang dapat ditimbulkan dari penugasan non tempur dapat melalui penekanan kepada para prajurit agar tetap menjaga profesionalisme dimanapun mereka bertugas dan melaksanakan program-program latihan yang telah disiapkan.

5. Apa ada kebijakan khusus terkait dengan dampak penugasan non tempur bagi prajurit?.

- Tidak ada kebijakan khusus mengenai dampak non tempur bagi prajurit, karena penugasan non tempur maupun tempur sudah diatur dalam Perpang Panglima TNI tentang Buku Petunjuk Operasi Militer Selain Perang.

6. Bagaimanakah kesiapan personil dan material terhadap pelaksanaan operasi militer untuk perang?

Prajurit Korps Marinir dimanapun berada selalu disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Perang, dengan adanya latihan rutin baik yang bertahap bertingkat dan berlanjut maupun latihan bertahap bertingkat tidak berlanjut, diharapkan kesiapan personel maupun material tempur Korps Marinir dapat terpelihara dengan baik melalui latihan-latihan dan pemeliharaan ken material tempur.

TRANSKRIP WAWANCARA

Interviewer : Asops Komandan Korps Marinir
Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2017
Waktu : 16.00 Wib
Tempat : Mako Kormar
Kode Instrumen : 1 B
Pertanyaan :

A Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit

1 Bagaimanakah mengimplementasikan kebijakan Korps Marinir tentang penugasan non tempur bagi prajurit? Implementasi kebijakan Korps Marinir tentang penugasan operasi non tempur/ OMSP dengan melaksanakan tahapan

- a) Persiapan yang meliputi pengorganisasian dan penyiapan personil serta materialnya.
- b) Perencanaan yang meliputi pengumpulan data dan menganalisa tugas yang akan dihadapi.
- c) Pelaksanaan yang meliputi penempatan pasukan
- d) Pengakhiran Operasi yang meliputi perintah dari komando atas tentang pengakhiran OMSP (Petunjuk penyelenggaraan Pengerahan Marinir dalam Rangka Penanggulangan Bencana)

2. Bagaimana konsep atau strategi pelaksanaan penugasan non tempur bagi prajurit supaya berhasil?

Keberhasilan tugas tentunya didukung oleh kualitas personil yang baik, untuk mendapatkan personil yang baik dalam menjalankan tugas OMSP maka dilaksanakan seleksi personil yang meliputi kesehatan, kesempatan dan ketrampilan yang dibutuhkan, juga latihan-latihan untuk pelaksanaan tugas.

3. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit?

- a). Dampak Positif penugasan non tempur bagi prajurit.
 - 1) Menambah pengalaman penugasan bagi prajurit.

- 2) Menambah pengetahuan, dan wawasan bagi prajurit.
 - 3) Prajurit dapat bersinergi dengan satuan lain dan masyarakat bahkan dari berbagai negara.
 - 4) Menambah keterampilan, tatangan dan tehnik yang berbeda dari berbagai jenis operasi yang sangat berbeda baik situasi, kondisi bahkan tujuan operasi.
 - 5) Sebagai sarana mengasah dan menguji perencanaan, kemampuan, kekuatan, keahlian serta profesionalisme prajurit.
 - 6) Dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit.
 - 7) Penugasan non tempur dapat dijadikan sebagai reward bagi prajurit yang memiliki etos kerja terbaik di satuan sehingga akan memacu prajurit lain untuk bekerja lebih baik.
- b). Dampak negatif penugasan non tempur bagi prajurit
- 1) Lamanya waktu penugasan 6 bulan sampai 1 tahun, cenderung membuat prajurit lengah dan mengabaikan aturan yang berlaku, sehingga akan mengakibatkan penyimpangan seperti : perkelahian, berada di daerah terlarang dll.
 - 2) Masih adanya kecelakaan kerja bagi prajurit yang sedang melaksanakan OMSP.
4. Bagaimanakah penanganan dampak yang ditimbulkan akibat penugasan non tempur bagi Prajurit? Bila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan tugas OMSP maka prajurit akan dikembalikan dari daerah satgas dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
5. Apakah ada kebijakan khusus terkait dengan dampak penugasan non tempur bagi prajurit?

Bagi prajurit yang berhasil melaksanakan tugas non tempur pada beberapa penugasan, akan mendapatkan penghargaan berupa tanda jasa dan pemberian uang saku 75% - 150% dari gaji pokok bagi satgas pengamanan pulau terluar. (TR Panglima TNI No Str/24/2017 Tgl 19 Januari 2017 Ttg Peningkatan Dukungan Operasi)

6. Bagaimanakah monitoring kesiapan personil dan material terhadap pelaksanaan operasi militer untuk perang?

Monitoring kesiapan personil dan material terhadap pelaksanaan OMP secara kontinue melalui latihan-latihan(Data laporan bulanan kesiapan personil dan material korps marinir)



TRANSKRIP WAWANCARA

Interviewer : Aspers Komandan korps marinir
Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2017
Waktu : 12.45 Wib
Tempat : Mako Kormar
Kode Instrumen : 1 B
Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit

1. Bagaimana mengimplementasikan kebijakan Korps Marinir tentang penugasan non tempur bagi Prajurit ? Apabila perintah penugasan diberikan secara otomatis staf personil menyiapkan data-data pendukung tentang kesiapan persinil. Satuan mana yang layak untuk ditugaskan.
2. Bagaimana konsep/ strategi pelaksanaan penugasan non tempur bagi Prajurit ? Strateginya penyiapan personil yang dipadang mampu melaksanakan tugas melalui seleksi internal
3. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ? Berbicara dampak ada dua yaitu dampak positif, seperti menambah wawasan baru bagi prajurit, sementara negatifnya dari penugasan yang dilaksanakan, yaitu menurunnya profesionalisme, akibat tidak adanya waktu untuk melaksanakan latihan tempur
4. Bagaimana penanganan dampak yang ditimbulkan akibat penugasan non tempur bagi Prajurit ? Prajurit yang melakukan pelanggaran yang berdampak kepada masyarakat luas, langsung diganti dengan prajurit lain
5. Apa ada kebijakan khusus terkait dengan dampak penugasan non tempur bagi Prajurit ? Tidak ada

B. Kesiapan operasi militer untuk perang (OMP) ?

6. Bagaimanakah kesiapan personil terhadap pelaksanaan operasi militer untuk perang ? Kesiapan prajurit marinir tdk berkurang, meskipun banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan jati dirinya.



TRANSKRIP WAWANCARA

Interviewer : Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir
Hari/Tanggal : Senin, 17 July 2017
Waktu : 13.30 Wib
Tempat : Mako Brigade Infanteri 2 Marinir
Kode Instrumen : 1 C
Pertanyaan :

A. Bagaimana Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit

1. Bagaimanakah mengimplementasikan kebijakan Pasmar 2 dalam penugasan non tempur Prajurit ? Implementasinya yaitu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, berkaitan dengan penugasan yang akan dihadapi oleh prajurit Brigif 2 Marinir, termasuk material yang digunakan untuk melaksanakan penugasan non tempur
2. Bagaimanakah mempersiapkan personil dan material terhadap penugasan non tempur bagi Prajurit ? Sebelumnya kita adakan seleksi internal untuk mendapatkan prajurit yang akan bertugas, kemudian dilaksanakan check kesehatan dan pemberian arahan-arahan yang berkaitan dengan tugas yang akan dihadapi, termasuk juga pengecheckkan material yang akan dibawa.
3. Bagaimanakah teknis pelaksanaan penugasan non tempur bagi Prajurit ? Teknis pelaksanaannya kita kirimkan tim aju sebelum personil utama tiba.
4. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ? Ada dua dampak yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya prajurit lebih banyak bergaul dengan masyarakat luas, sehingga wawasannya bertambah, sementara mereka tidak bisa membina diri, secara fisik ada penurunan profesionalisme sebagai TNI terutama naluri tempurnya, karena penugasan yang dilakukan sifatnya pengamanan statis.

5. Bagaimanakah penanganan dampak yang ditimbulkan akibat penugasan non tempur bagi Prajurit ?Apabila ada permasalahan di tempat penugasan yang bersangkutan kita tarik digantikan yang lain, termasuk memberikan saran kepada atasan supaya lamanya penugasan tidak lebih dari tiga bulan.

6. Apakah ada kiat khusus terkait dengan penugasan non tempur bagi Prajurit ?Tidak ada, semua penugasan bagi saya merupakan suatu kehormatan yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.

B. Kesiapan operasi militer untuk perang (OMP) ?

7. Bagaimanakah kesiapan personil dan material dalam pelaksanaan operasi militer untuk perang ?Memanfaatkan personil yang ada secara optimal meskipun rielynya baru 55% dari seharusnya, begitu juga material tempurnya.Kesiapan dalam rangka menghadapi agresi dari luar merupakan tugas pokok TNI dan prajurit Brigif 2 Marinir selalu siap.



TRANSKRIP WAWANCARA

Interviewer : Perwira Staf Operasi Brigade 2 Marinir

Hari/Tanggal : Rabu, 12 July 2017

Waktu : 11.00 Wib.....

Tempat : Mako Brigade Infanteri 2 Marinir

Kode Instrumen : 1 C

Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit

1. Bagaimanakah mempersiapkan personil dan material terhadap penugasan non tempur bagi Prajurit ?

- a) Proses mempersiapkan personil dan material terhadap penugasan non tempur :
- b) Melaksanakan rekrutmen dan seleksi sesuai kualifikasi.
- c) Menerbitkan Surat Perintah sesuai tugas.
- d) Memberikan pembekalan kepada prajurit yang akan melaksanakan operasi disesuaikan dengan tugas pokok yang akan dilaksanakan.
- e) Menyiapkan peralatan maupun material yang mendukung penugasan baik alkap perorangan maupun Tim.
- f) Melaksanakan pelatihan dalam bentuk Pra Tugas Non Tempur, bekerja sama dengan unsur-unsur yang terlibat dalam penugasan yang akan dilaksanakan.
- g) Mengirimkan Tim Aju untuk melaksanakan orientasi dan survey lokasi yang akan menjadi medan penugasan, sehingga dapat tepat sasaran dalam pelaksanaan operasi tersebut.

2. Bagaimanakah teknis pelaksanaan penugasan non tempur bagi Prajurit ? Teknis pelaksanaan penugasan Non Tempur bagi Prajurit :

- a) Direktif dari Panglima TNI tentang penugasan non tempur.
- b) Kasal memerintahkan kepada Dankormar untuk menyiapkan Satuan Tugas non tempur
- c) Dankormar mengeluarkan perintah kepada Danpasmar-2 untuk menyiapkan Satuan Tugas dengan melaksanakan koordinasi

internal maupun eksternal dengan badan/instansi terkait secara ketat tentang tugas, kebutuhan personil maupun material.

- d) Pasmar-2 segera menyiapkan kebutuhan personil maupun material sesuai dengan perintah Satuan Atas serta melaksanakan koordinasi lanjutan dengan badan/instansi terkait tentang rencana penugasan yang akan dilaksanakan untuk dituangkan dalam bentuk Rencana Operasi.
- e) Satuan yang ditunjuk segera melaksanakan konsolidasi dan penyiapan personil sesuai dengan Rencana Operasi yang telah dibuat. Apabila jangka waktu masih cukup lama, melaksanakan pembekalan dan pelatihan disesuaikan dengan medan penugasan non tempur yang akan dilaksanakan.
- f) Mengirimkan Tim Aju untuk melaksanakan orientasi dan survey lokasi serta koordinasi dengan pihak berwenang setempat yang akan menjadi medan penugasan.
- g) Memberangkatkan Satuan Tugas sesuai dengan sektor yang ditentukan.
- h) Melaksanakan kontrol dan pengawasan serta merotasi personel sesuai kebutuhan (minimal 3-6 bulan).
- i) Mendistribusikan logistik operasi sesuai kebijakan.
- J) Melaksanakan evaluasi kinerja Satuan Tugas.

3. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ? Dampak penugasan non tempur bagi prajurit :

- a). Dampak Positif :
 - 1) Pengalaman baru prajurit tentang medan penugasan non tempur sekaligus refreshing terhadap kejenuhan dalam melaksanakan tugas harian di kesatuan.

- 2) Memberikan sedikit nilai tambah ekonomi bagi prajurit karena adanya tunjangan tambahan bagi prajurit yang melaksanakan penugasan.
- 3) Sosialisasi/Interaksi langsung dengan masyarakat non militer dalam tugas keseharian dapat membawa pengaruh positif ke kesatuan, Korps, Angkatan, TNI.

b). Dampak Negatif :

Terhadap Perorangan :

- 1) Menurunnya profesionalisme karena tugas-tugas yang dilakukan tidak sesuai profesi dan tidak dapat dilaksanakan latihan sesuai profesi.
- 2) Menurunnya kemampuan kesamaptaan karena tugasnya dilakukan secara penuh (full day) dan kesempatan pembinaan fisik hanya bisa dilakukan dengan kesadaran (tidak terbina sebagaimana kewajiban di kesatuan)
- 3) Menurunnya kebugaran dan kesehatan karena lingkungan, kebiasaan dan kinerja tidak mendukung sebagaimana tugas sehari-hari di kesatuan.
- 4) Situasi dan lingkungan kerja yang berbeda, dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Contoh perselingkuhan, penyelundupan, penyelewengan anggaran, penganiayaan dan lain-lain.
- 5) Secara psikologis, prajurit yang sudah merasa nyaman mendapatkan penugasan non tempur akan menurun morilnya apabila kembali ke kesatuan.

Terhadap Kesatuan :

- 1) Prajurit tidak terlatih sesuai profesi sehingga menurunkan kualitas kesiapsiagaan operasional tempur.
- 2) Ketersediaan prajurit dalam melengkapi organisasi tugas di kesatuan sangat kurang sehingga mempengaruhi proses latihan yang dilaksanakan oleh prajurit yang berada di basis. Hal ini berpengaruh terhadap fungsi dari organisasi tugas di kesatuan.

- 3) Berkurangnya jumlah prajurit untuk penugasan non tempur, otomatis mengurangi kesiapsiagaan operasional satuan.
- 4) Latihan Rutin maupun Crash Program dalam rangka pembinaan kekuatan yang dilaksanakan tidak optimal karena organisasi yang berangkat latihan bukan organisasi organik satuan (organisasi bentukan).
- 5) Tujuan dan sasaran pembinaan kesatuan tidak tercapai karena tidak semua prajurit melaksanakan materi latihan yang sudah di programkan (Lat TW 1 ikut, tapi di TW 2 sudah berangkat Satgas non tempur. Lalu saat Lat TW 4 baru kembali ke basis dan langsung latihan Angkatan/Gabungan)

Beban Kerja prajurit di Basis berlipat karena personel berkurang. Hal ini mengakibatkan menurunnya moril prajurit di Basis dan berdampak kepada kesiapan Kesatuan.

4. Bagaimanakah penanganan dampak yang ditimbulkan akibat penugasan non tempur bagi Prajurit ?
 - a. Melaksanakan Pembekalan sebelum pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan.
 - b. Melaksanakan pengawasan selama persiapan, pelaksanaan dan evaluasi sesudah penugasan sehingga dapat diminimalisir pelanggaran ataupun dampak negatif yang muncul.
 - c. Jam Komandan di tempat penugasan saat peninjauan satuan tugas.
 - d. Memberi kesempatan untuk menyelesaikan kegiatan diluar kedinasan setelah laksanakan penugasan maksimal 2 hari, sebelum penyesuaian kegiatan rutin di kesatuan.
 - e. Memberikan pengarahan, jam Komandan, interaksi aktif dengan Komandan untuk penyesuaian tugas di kesatuan.
 - f. Memberikan pelayanan psikiater bagi prajurit yang mengalami gangguan psikologis saat melaksanakan penugasan.
 - g. Melaksanakan Uji Pemeriksaan Kesehatan kepada prajurit yang baru selesai melaksanakan penugasan.

- h. Melaksanakan Uji Kesamaptaan untuk selanjutnya dievaluasi dan diberikan kesempatan untuk penyesuaian.
- i. Membekali prajurit dengan buku dan materi pengetahuan profesi.



TRANSKRIP WAWANCARA

Interviewer : Komandan Komando Latihan Marinir
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2017
Waktu : 10.00 Wib
Tempat : Mako Kolatmar
Kode Instrumen : 1 B
Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit.

Apakah ada dampak dari penugasan Non Tempur Prajurit Marinir seperti penugasan Pam Bandara, Kereta Api, Tugas Bantuan Pemda, Pam VIP dan Lain-lain, terhadap kualitas latihan prajurit Marinir.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keamanan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, tugas pokok TNI terbagi menjadi Dua yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

Tercatat, ada 14 fungsi OMSP yang tertuang dalam Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang TNI, pada Bagian tiga Pasal 7 ayat (2), yang bisa dilakukan oleh TNI, diantaranya yaitu mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital, membantu tugas pemerintah daerah, membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu menanggulangi akibat bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan, sampai pencarian dan pertolongan kecelakaan yang diatur dalam undang-undang.

Sepanjang perjalanannya Korps Marinir selalu mendapatkan tugas-tugas, baik Tugas OMP maupun OMSP seperti Bhakti Sosial, SAR, TNI

Manunggal, Surya Baskara Jaya dan lain sebagainya. Dan dalam setiap menjalankan tugasnya, sebagai prajurit Korps Marinir tidak terlepas dari Jati Dirinya sebagai Pasukan Pendarat. Sebagai Kotama Pembinaan TNI AL, pada situasi damai Korps Marinir disamping melaksanakan tugas-tugas bantuan OMSP juga harus melaksanakan pembinaan kemampuan tempurnya sebagai Pasukan Pendarat, Sebagai upaya untuk mempertahankan kesiapsiagaan tempurnya yaitu dengan melaksanakan pembinaan latihan yang dilaksanakan secara teratur dan terprogram.

Dengan tetap memperhatikan dan mengatur rotasi penugasan prajurit serta jadwal pelaksanaan pembinaan satuan diharapkan tidak akan ada pengaruh antara tugas Non Tempur Prajurit Marinir seperti penugasan Pam Bandara, Kereta Api, Tugas Bantuan Pemda, Pam VIP dan Lain-lain dengan kemampuan prajurit Korps Marinir sebagai pasukan pendarat.

B. Kesiapan Operasi Militer untuk Perang (OMP) ?

Bagaimanakah pandangan Komandan tentang kesiapan Prajurit Marinir terhadap Operasi Militer Perang ?

Operasi Militer Perang (OMP) adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap bangsa Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.

Pada dasarnya setiap prajurit Korps Marinir harus selalu siap sewaktu-waktu untuk dikerahkan ke medan penugasan, baik penugasan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Untuk menjaga kemampuan profesionalisme Prajurit, Korps Marinir telah melaksanakan kegiatan pembinaan latihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan Jukbinlat dan Jukmatlat Korps Marinir. Hal tersebut dalam rangka memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan tempur prajurit Korps Marinir guna tercapainya

tingkat kesiapan dan kesiagaan operasional untuk mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

Menurut pandangan kami terhadap pembinaan kesiapan prajurit Korps Marinir dihadapkan dengan tugas Operasi Militer Perang masih sangat relevan dan memadai. Hal tersebut terlihat masih berjalannya siklus pembinaan latihan yang merupakan suatu daur latihan atau tahapan latihan Korps Marinir yang dirancang dalam periode latihan tiap Triwulan dalam satu tahun, disesuaikan dengan rencana strategi pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut.

Tujuannya adalah untuk memiliki dan menjaga profesionalisme prajurit agar selalu dalam kondisi siap operasional dan tidak mengalami penurunan kualitas kemampuan. Sehingga sewaktu-waktu dapat siap digunakan/dikerahkan untuk melaksanakan tugas-tugas Korps Marinir / TNI AL / TNI.

TRANSKRIP WAWANCARA

Interviewer : Komandan Korps Marinir
Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2017
Waktu : 17.30 Wib
Tempat : Mako Kormar
Kode Instrumen : 1 A
Pertanyaan :

A. Dampak Penugasan Non Tempur Bagi Prajurit ?

1. Bagaimanakah latar belakang adanya kebijakan penugasan non tempur bagi prajurit ? Penugasan prajurit Korps Marinir di Pt Kereta Api dan Pt Angkasa Pura serta tugas perbantuan lainnya, awalnya merupakan permintaan dari Kementerian dan Lembaga tersebut kepada kita, untuk ikut menertibkan penumpang atau calon penumpang yang selama ini bertindak semaunya dan tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan.
2. Kenapa dilaksanakan penugasan non tempur bagi prajurit ? Prajurit Korps Marinir mengemban tugas OMP dan OMSP atau penugasan non tempur, hal ini tidak boleh dipisahkan karena Undang-undang mengamanatkan demikian dan sesuai UU No 34 th 2004 tentang TNI.
3. Bagaimanakah mempersiapkan penugasan non tempur bagi prajurit ? Asops yang mempersiapkan.
4. Bagaimanakah konsep/ strategi pelaksanaan penugasan non tempur bagi prajurit ? Prajurit yang akan melaksanakan penugasan, diberikan arahan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sesuai situasi dan kondisi yang bakal dihadapi.
5. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penugasan non tempur bagi prajurit ? Dampak positifnya sangat banyak diantaranya, prajurit menjadi lebih peka terhadap situasi dan kondisi sosial masyarakat di tempat penugasannya, sementara dampak negatifnya juga ada seperti penanganan kasus pidana yang berlebihan dan kurang